



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

TAHUN ANGGARAN 2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**



**BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandar Lampung tahun 2022 sesuai dengan amanat dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang petunjuk teknis, pelaporan dan tata cara reviunya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung serta penjelasan tentang Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini, khususnya seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta Tim Perumus yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama penyusunan LAKIP ini. Pastinya LAKIP ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah dilakukan upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar OPD terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi ataupun nara sumber. Mudah-mudahan LAKIP Kota Bandar Lampung ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah tahun 2022 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Maret 2023
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

***K*KH T I S A R *L*L K S E K U T I F**

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021- 2026, untuk mewujudkan visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 7 misi, 6 tujuan, 17 sasaran strategis dan 31 Indikator Kinerja Utama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 dan salah satu media pertanggungjawaban Walikota selaku Kepala Daerah. LAKIP tidak sekedar hanya alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026 yakni sebanyak 31 indikator kinerja yang mendukung 17 sasaran strategis. Terdapat 18 indikator kinerja sasaran mencapai target/lebih dengan kategori Sangat Baik, dan 9 indikator kinerja sasaran dengan kategori Baik. Sedangkan 1 indikator dengan kategori cukup dan 3 indikator dengan kategori sangat kurang. Dari 31 indikator kinerja, terdapat 18 indikator telah mencapai/lebih dari target RPJMD dengan perolehan persentase $\geq 100\%$. Sedangkan indikator kinerja dengan perolehan persentase dibawah 100% sebanyak 9 indikator dengan rentang capaian 80% sampai dengan 99,99 % dan 1 indikator dengan perolehan capaian 65,56%, serta 3 indikator dengan capaian terendah yakni sebesar 0-40,77%. Adapun capaian indikator kinerja per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	71,66	Tahun
	1.2. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	5,16	Persen
	1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	2,13	Persen
2. Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	10,96	Tahun
	2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	14,71	Tahun
3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1. Indeks Pembangunan Gender	93,88	93,93*	Angka
	3.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Tingkat Capaian
	3.3. Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	6,30	Persen
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,81	89,95	Persen
5. Meningkatnya Pengendalian Banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0	84	Persen

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

1	2	3	4	5
6. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	23,63	0	Persen
	6.2. Persentase Kawasan Kumuh	0,890	0,89	Persen
7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	54,65	Persen
8. Menurunnya Masalah Kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	50,00	40	Persen
9. Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	21,09	Persen
	9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	14,94	Persen
	9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	14,82	Persen
	9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	30,54	Persen
	9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	18,83	Persen
10. Meningkatnya Investasi dan Memperluas Kesempatan Kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,99	43,94	Persen
	10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	24,77	Persen
	10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	7,91	Persen
11. Menurunnya Kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,43	91,79	Persen
	11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	56.152.000	Juta RP
12. Meningkatnya Penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	77,00	31,40	Persen
13. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.531	1.632	Angka
	13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,50	100	Persen
14. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40,00	40,00	Persen
15. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	58,77 (CC)	Skor
16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16.1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	61,43	58,86	Angka
17. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	17.1. Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	165,56*	Angka

D **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	7
1.4. Aspek Strategis Dan Strategi Daerah Kota Bandar Lampung.....	9
1.5. Sistematika.....	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	44
2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	44
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	70
3.1. Capaian Kinerja Pemda Kota Bandar Lampung	70
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	75
3.3. Realisasi Anggaran.....	114
3.4. Capaian Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Kab/Kota Serta Provinsi dan Nasional.....	166
3.4. Capaian Prestasi dan Penghargaan Tahun 2022.....	177
BAB IV PENUTUP	179
4.1. Kesimpulan.....	179
4.2. Saran.....	180
LAMPIRAN-LAMPIRAN	181

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung.....	11
Tabel 1.2	Data Hari Hujan Per Bulan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	10
Tabel 1.3	Suhu Air Laut Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	13
Tabel 1.4	Penyebaran Penduduk Kota Bandar Lampung Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	16
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandar Lampung tahun 2022.....	17
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022.....	19
Tabel 1.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022.....	21
Tabel 1.8	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	22
Tabel 1.9	Laju Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022.....	24
Tabel 1.10	Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran.....	25
Tabel 1.11	Garis Kemiskinan, Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022.....	25
Tabel 1.12	Data Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Di kota bandar lampung tahun 2014 – 2022.....	26
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Pada Setiap Misi.....	50
Tabel 2.2	Hubungan Visi, Misi,Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung.....	52
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022...	66
Tabel 3.1	Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progres Positif.....	72
Tabel 3.2	Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progres Positif.....	72
Tabel 3.3	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	72
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	74
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Misi I Tahun 2022.....	76
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Misi I Tahun 2021-2022.....	79

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

Tabel 3.7	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Misi I Tahun 2022.....	79
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi Misi I Tahun 2022.....	80
Tabel 3.9	Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) dan Indeks Pembnagunan Gender (Ipg) Menurut Komponen dan Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022.....	82
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Misi II Tahun 2022.....	85
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Misi II Tahun 2021-2022.....	86
Tabel 3.12	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Misi II Tahun 2022.....	87
Tabel 3.13	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Misi II Tahun 2022....	87
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Misi III Tahun 2022.....	92
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Misi III Tahun 2021-2022.....	93
Tabel 3.16	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Misi III Tahun 2022.....	93
Tabel 3.17	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Misi III Tahun 2022...	94
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA).....	99
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Misi IV Tahun 2022.....	102
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Misi IV Tahun 2021-2022.....	103
Tabel 3.21	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Misi IV Tahun 2022.....	104
Tabel 3.22	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Misi IV Tahun 2022...	104
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Misi V Tahun 2022.....	107
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Kinerja Misi V Tahun 2021-2022.....	107
Tabel 3.25	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Misi V Tahun 2022.....	108
Tabel 3.26	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Misi V Tahun 2022....	108
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Sasaran Misi VI Tahun 2022.....	110
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Misi VI Tahun 2021-2022.....	110
Tabel 3.29	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Misi VI Tahun 2022.....	111
Tabel 3.30	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Misi VI Tahun 2022...	111
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Misi VII Tahun 2022.....	113
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian Kinerja Misi VII Tahun 2021-2022.....	113
Tabel 3.33	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Misi VII Tahun 2022.....	113
Tabel 3.34	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Misi VII Tahun 2022..	114
Tabel 3.35	Realisasi Anggaran Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021..	115
Tabel 3.36	Program Pendukung Pencapaian Misi Visi Dan Sasaran Strategis Tahun 2022.....	117
Tabel 3.37	Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022.....	168
Tabel 3.38	Perbandingan Penduduk Kota Bandar Lampung Dan Palembang Tahun 2019- 2022.....	169

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

Tabel 3.39	Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/ Kota Se Provinsi Lampung.....	172
Tabel 3.40	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.....	175
Tabel 3.41	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten /Kota Se Provinsi Lampung....	176

DAFFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	7
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kota Bandar Lampung.....	10
Gambar 1.3	Rata-Rata Suhu Laut Dan Udara Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	14
Gambar 1.4	Suhu Rata-Rata Bulanan (Siang Dan Malam) Di Kota Bandar Lampung.....	15

D AFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Suhu Rata-Rata Bulanan (Siang Dan Malam) Di Kota Bandar Lampung	15
Grafik 3.1	Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022.....	167
Grafik 3.2	IPM Kota Bandar Lampung, Provinsi dan Nasional.....	170
Grafik 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional tahun 2017 – 2021.....	170
Grafik 3.4	Tingkat Inflasi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	174

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan/sasarannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga terciptanya Pemerintah yang akuntabel dan terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Saat ini terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja yang bergeser dari “ berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “ berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Laporan Kinerja Kota Bandar Lampung menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Walikota Bandar Lampung sebagai Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran, pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung , sehingga saat ini susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan kebakaran;
8. Dinas Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan UKM;
17. Dinas Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
18. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan;
 20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 21. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
 23. Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
 24. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 25. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian, peternakan dan hewan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

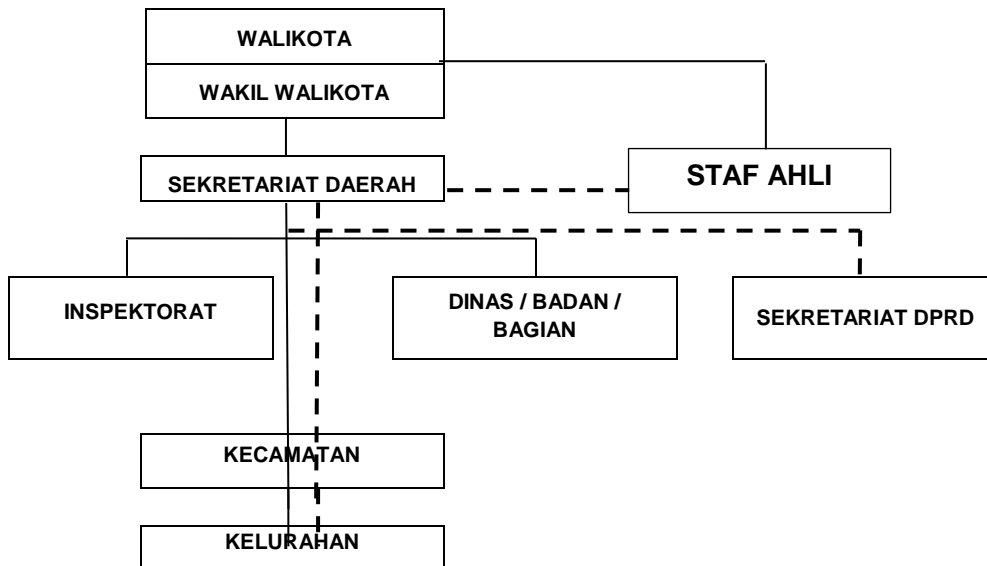
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi pengelolaan pajak dan retribusi dan pendapatan daerah;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana.
- f. Kecamatan, terdapat 20 Kecamatan yang terdiri dari 18 Kecamatan Tipe A dan 2 Kecamatan tipe B.

Selanjutnya pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD, terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandar Lampung selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.1

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini berisikan mengenai pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung berikut indikator kerjanya, penjelasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta memuat perbandingan pencapaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2022.
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

1.4. ASPEK STRATEGIS DAN STRATEGI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

1.4.1. Aspek Strategis Daerah Kota Bandar Lampung

1.4.1.1. Aspek Geografis

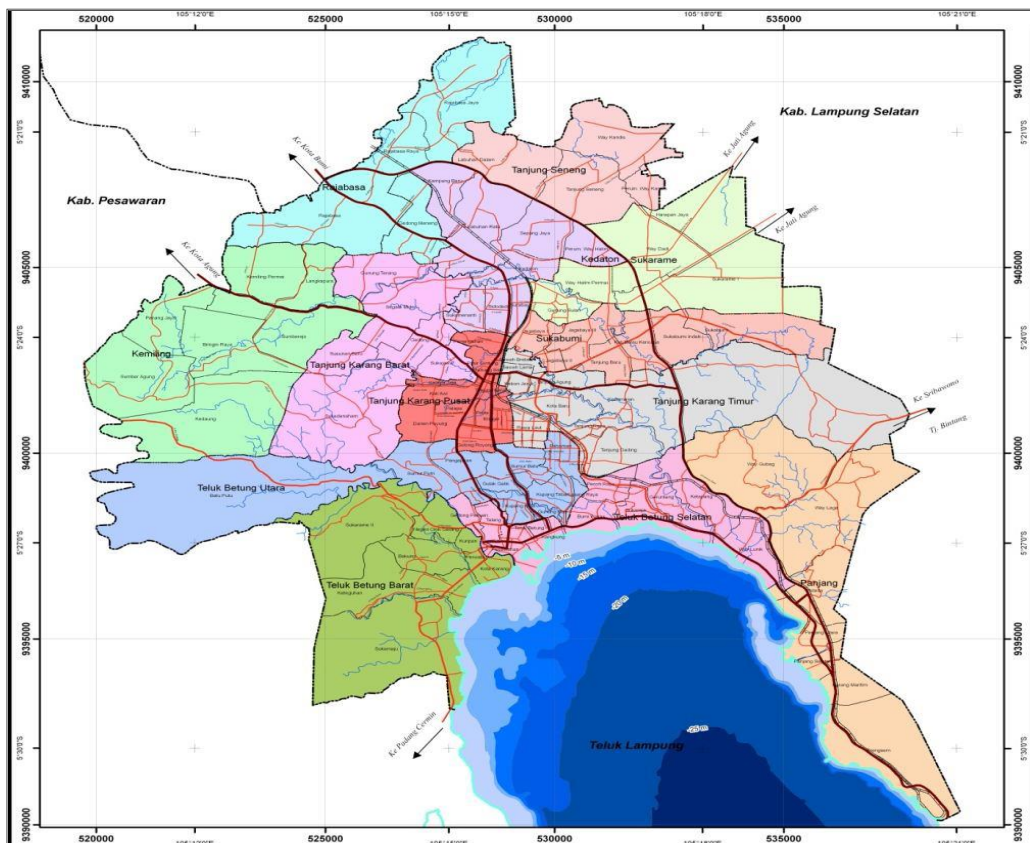
Kota Bandar Lampung berada di bagian selatan Provinsi Lampung (Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera.

Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Ketibung Kabupaten Pesawaran serta Teluk Lampung.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

GAMBAR 1.2
PETA ADMINISTRASI KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung,2022

Luas Wilayah Kota Bandar Lampung adalah 183,77 km² yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, 288 Lingkungan dan 2.776 RukunTetangga (RT) dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

TABEL 1.1**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH KELURAHAN MENURUT
KECAMATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
1.	Teluk Betung Barat	18,26	5	14	98
2.	Teluk Betung Timur	10,39	6	14	101
3.	Teluk Betung Selatan	3,49	6	14	141
4.	Bumi Waras	4,52	5	12	149
5.	Panjang	13,64	8	20	227
6.	Tanjung Karang Timur	2,07	5	11	109
7.	Kedamaian	8,34	7	16	128
8.	Teluk Betung Utara	4,38	6	12	162
9.	Tanjung Karang Pusat	3,45	7	14	151
10.	Enggal	2,78	6	13	120
11.	Tanjung Karang Barat	11,54	7	16	137
12.	Kemiling	21,33	9	22	251
13.	Langkapura	5,30	5	11	76
14.	Kedaton	3,77	7	17	139
15.	Rajabasa	12,93	7	14	111
16.	Tanjung Senang	9,24	5	11	115
17.	Labuan Ratu	6,10	6	12	101
18.	Sukarame	10,92	6	12	116
19.	Sukabumi	25,04	7	16	157
20.	Way Halim	6,25	6	16	184
JUMLAH		183,77	126	219	2.774

Sumber : Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW 2021-2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Kemiling merupakan wilayah terluas dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu seluas 24,24 km² atau 12,29% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung, sedangkan Kecamatan Tanjung Karang Timur merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas 2,03 km² atau 1,03% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung. Untuk jumlah kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Kemiling sebanyak 9 kelurahan.

1.4.1.2 Aspek Klimatologi

Iklm adalah pola cuaca jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Cuaca dapat berubah dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan atau bahkan tahun ke tahun. Pola cuaca di suatu wilayah, biasanya dilacak setidaknya selama 30 tahun, dan dianggap sebagai iklimnya.

Perubahan iklim adalah perubahan rata-rata cuaca dalam jangka waktu periode yang panjang. Contohnya cuaca hujan yang lebih banyak intensitas ataupun kuantitasnya serta musim kemarau yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam istilah modern saat ini istilah perubahan iklim juga dikenal dengan istilah pemanasan global dikarenakan umumnya perubahan iklim menyebabkan hawa panas bumi yang semakin meningkat.

Pengaruhnya dalam pembangunan ekonomi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Iklim memiliki pengaruh langsung ketika aktifitas ekonomi tersebut banyak bergantung pada iklim dan cuaca seperti pertanian tadah hujan dan aktifitas nelayan di laut. Dan pengaruh tidak langsung terjadi ketika bencana akibat perubahan iklim itu menyebabkan terganggunya aktifitas ekonomi seperti bencana banjir yang menyebabkan perekonomian masyarakat lumpuh.

Berdasarkan data dari hikersbay.com/climate/Indonesia bahwa Cuaca di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh **Tropis basah** iklim. Musim kemarau tidak. Bulan terkering memiliki setidaknya 60 mm (2.4") hujan. Curah hujan umumnya merata sepanjang tahun. Semua suhu rata-rata bulanan lebih besar dari 18° C (64° F). Adapun fenomena cuaca yang tercatat sepanjang tahun 2022, didominasi cuaca cerah pada pukul 10.00 wib hingga pukul 11.00 wib. di Kota Bandar Lampung, sedangkan hari-hari cerah tidak terlihat di bulan Agustus. Untuk lebih lengkapnya fenomena cuaca di Kota Bandar Lampung sepanjang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 1.2**DATA HARI HUJAN PER BULAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

Acara (rata-rata tahunan)	Januari	Februari	Maret	April	Mungkin	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Hari hujan	22	19	21	18	14	9	6	1	3	4	12	21
Hari salju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salam hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hari-hari cerah	16	18	19	18	11	5	2	0	2	3	13	20
Hari-hari berkabut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hari dengan tornado*	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Hari jam	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Setiap hari jam cerah	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	10

* Tornado - dihitung untuk 5 tahun

Sumber : hikersbay.com/climate/Indonesia/bandarlampung, 2022

Kondisi suhu di Kota Bandar Lampung sepanjang Tahun 2022, maksimal suhu 31° Celcius dan suhu terendah 30° C, namun rata-rata suhu di Kota Bandar Lampung sepanjang Tahun 2022 ada di range 29°C - 30° C. adapun selengkapnya suhu di Kota Bandar Lampung per bulan di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

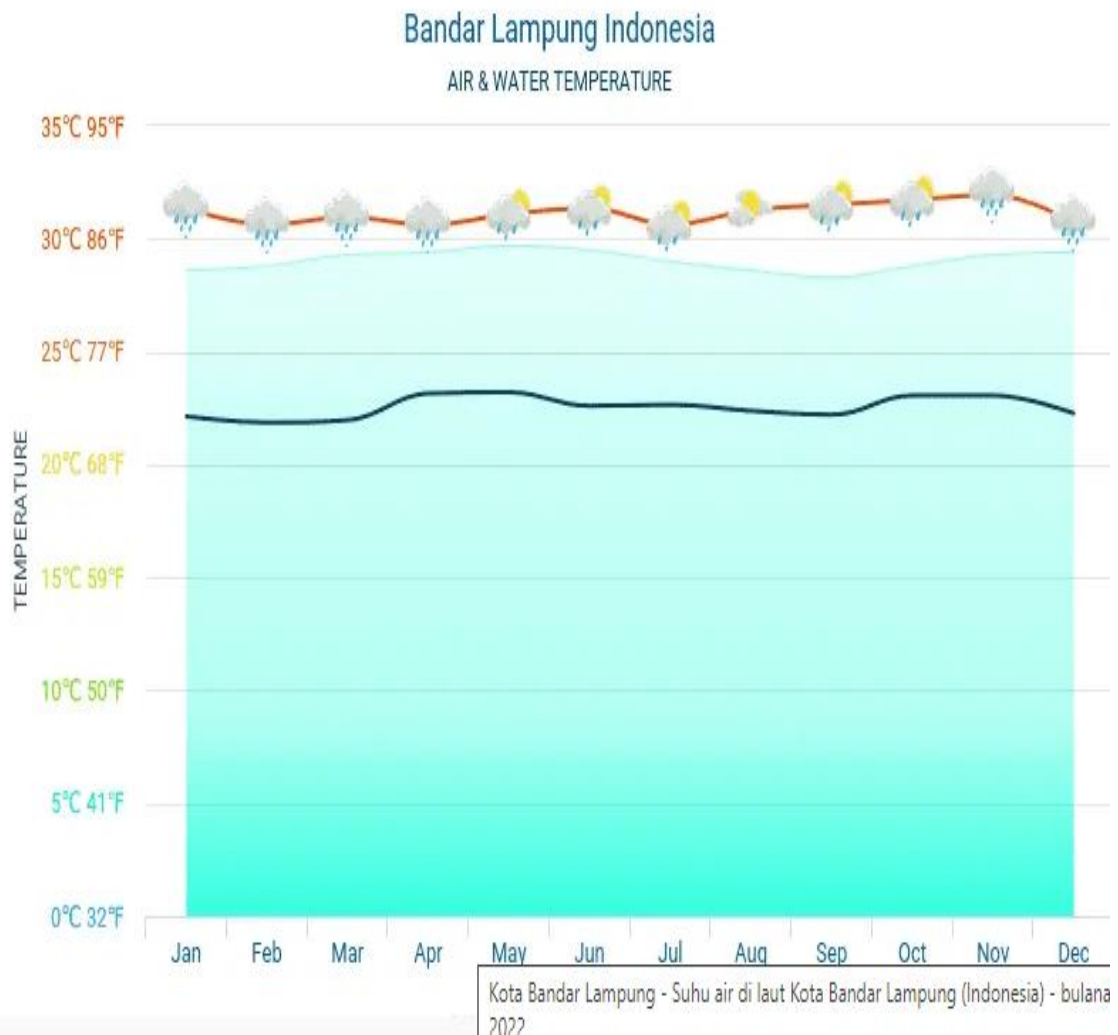
TABEL 1.3**SUHU AIR LAUT DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

suhu	Januari	Februari	Maret	April	Mungkin	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
max	30°C	30°C	31°C	31°C	31°C	30°C	30°C	30°C	30°C	31°C	30°C	30°C
rata-rata	29°C	29°C	30°C	30°C	30°C	30°C	29°C	29°C	29°C	29°C	30°C	30°C

Sumber : hikersbay.com/climate/Indonesia/bandarlampung, 2022

GAMBAR 1.3.

RATA-RATA SUHU LAUT DAN UDARA DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022



Sumber : : hikersbay.com/climate/Indonesia/bandarlampung, 2022

Suhu rata-rata bulanan (siang dan malam) di Kota Bandar Lampung. Curah hujan tahunan rata-rata (hujan dan salju) dan hari cuaca basah per bulan di Kota Bandar Lampung. Umumnya bulan-bulan yang hangat, cerah untuk melakukan aktivitas di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

GRAFIK 1.1

SUHU RATA-RATA BULANAN (SIANG DAN MALAM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber : : hikersbay.com/climate/Indonesia/bandarlampung, 2022

Grafik suhu rata-rata bulanan pada hari dan malam hari di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

GAMBAR 1.4

SUHU RATA-RATA BULANAN (SIANG DAN MALAM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber : : hikersbay.com/climate/Indonesia/bandarlampung, 2022

1.4.1.3. Aspek Demografi Daerah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2022 meningkat dari 1.184.949 jiwa di tahun 2021 menjadi 1.209.937 jiwa di tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 24.988 jiwa atau 2,13%. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung menurut kelompok umur tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini.

TABEL 1.4**PENYEBARAN PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022**

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	0-14 (usia muda)	145.538	137.358	282.896	23,38
2	15-64 (usia produktif)	432.593	413.234	845.827	70,00
3	65+ (usia tua)	37.740	43.474	812.14	6,71
JUMLAH		615.871	594.066	1.209.937	100,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah usia produktif di Kota Bandar Lampung mencapai 69,91% dari jumlah penduduk Kota. Hal ini menjadi potensi daerah karena menjadi bonus demografi Tahun 2030, penduduk pada usia produktif ini akan menjadi nilai tambah bagi kesempatan kerja. Penduduk usia produktif di kelompokkan mulai umur 15–64 tahun berjumlah 845.827 jiwa yang terdiri dari 413.234 jiwa perempuan dan 432.593 jiwa laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di bandingkan perempuan atau 48,85% penduduk Kota Bandar Lampung dengan usia produktif berjenis kelamin perempuan sedangkan 51,15% berjenis kelamin laki-laki.

Usia tua dihitung mulai 65 tahun ke atas berjumlah 81.214 jiwa, namun ternyata berbanding terbalik dengan usia produktif, usia tua berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dimana

jumlah perempuan sebanyak 43.474 jiwa, sedangkan laki-laki 37.740 jiwa atau jumlah perempuan usia tua 53,53%.

TABEL 1.5**JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

Kecamatan Subdistrict	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Teluk Betung Barat	21 995	20 647	42 642
Teluk Betung Timur	28 863	27 038	55 901
Teluk Betung Selatan	22 660	21 823	44 483
Bumi Waras	33 812	31 730	65 542
Panjang	42 755	41 096	83 851
Tanjung Karang Timur	22 743	21 954	44 697
Kedamaian	30 504	29 580	60 084
Teluk Betung Utara	28 248	27 319	55 567
Tanjung Karang Pusat	29 570	28 459	58 029
Enggal	14 939	14 788	29 727
Tanjung Karang Barat	34 679	33 341	68 020
Kemiling	46 701	45 206	91 907
Langkapura	23 011	22 197	45 208
Kedaton	30 081	29 412	59 493
Rajabasa	30 566	29 190	59 756
Tanjung Senang	32 600	31 907	64 507
Labuhan Ratu	27 374	26 990	54 364
Sukarame	35 592	34 681	70 273
Sukabumi	40 232	38 492	78 724
Way Halim	38 946	38 216	77 162
Bandar Lampung	615 871	594 066	1 209 937

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Bandar Lampung per kecamatan hampir seimbang antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki di Kota Bandar Lampung. Namun jumlah penduduk laki-laki lebih besar persentasenya di hampir semua kecamatan dengan range 49% hingga 51% dari total penduduk kecamatan. Penduduk yang paling banyak ada di Kecamatan Sukabumi yaitu 78.724 jiwa atau 6,50% dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung.

1.4.1.4. Aspek Topografis

Secara Topografis Kota Bandar Lampung mempunyai topografi sangat beragam, mulai dari dataran, pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung. Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah pantai terdapat disekitar Telukbetung dan Panjang dan Pulau-Pulau kecil di bagian selatan;
- 2) Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian utara;
- 3) Wilayah perbukitan terdapat disekitar Telukbetung bagian Utara;
- 4) Wilayah dataran dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjungkarang bagian Barat yaitu Gunung Betung dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam. Kondisi geografis wilayah yang berbukit di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20 persen dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40 persen. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 persen diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 persen diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

1.4.1.5. Aspek Ekonomi Daerah

Ada 4 (empat) faktor yang digunakan dalam melihat aspek perkembangan ekonomi di Kota Bandar Lampung, yaitu : Laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, Laju Inflasi dan Penduduk Miskin.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kota Bandar Lampung dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kota Bandar Lampung tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Perekonomian nasional yang terus menunjukkan pertumbuhannya baik dari segi investasi maupun sektor perdagangan memberikan imbas pada nilai investasi di Kota Bandar Lampung yang semakin meningkat, begitupun pada sektor perdagangan memperlihatkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Data laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dari tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel 1.6 di bawah ini

TABEL 1.6
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	6,20
2	2019	6,17
3	2020	-1,88
4	2021	3,10
5	2022	4,95

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan Data BPS Kota Bandar Lampung Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandar Lampung sebelum terjadinya Covid 19 atau Tahun 2018 mencapai 6,20% dan turun pada Tahun 2019 menjadi 6,17%, dan terus menurun pada tahun 2020 sebesar -1,88%. Kontraksi ekonomi di Kota Bandar Lampung hamper terjadi di seluruh dunia sebagai dampak Covid 19. Namun, kondisi perekonomian terus membaik, halite tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2022 mencapai sebesar 4,95 %, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021 yang hanya mencapai sebesar 3,10% atau mengalami peningkatan cukup tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga -1,88%.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam, non alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung dari tahun 2020-2022, dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini.

TABEL 1.7**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
KOTA BANDAR LAMPUNGTAHUN 2020-2022**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010 (milliar rupiah)	58869,44	61525,51	67 940,87
2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen)	-1,88	3,10	4,95
3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010(Miliar Rupiah)	38632,20	39830,38	41800,07

Sumber Data : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa PDRB Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, yaitu pada tahun 2022 PDRB Kota Bandar Lampung sebesar Rp.58.869.44 (dalam juta), meningkat menjadi 61.525,51 (dalam juta) dan meeningkat menjadi 67.940,87 (dalam juta) pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 15,40% jika dari tahun 2020 ke tahun 2022.

Peningkatan PDRB berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu -1,88% pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,95% atau mengalami pertumbuhan riil sebesar 6,83%. Pendapatan Perkapita masyarakat baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku juga mengalami peningkatan.

Kinerja pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan per-kapita dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Data laju pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2022 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 1.8

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3,85	3,68	3,76	3,71	3,52
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,36	3,34	3,56	3,32	3,26
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	21,18	21,27	20,84	21,09	19,88
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,28	0,27	0,29	0,29	0,28
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	11,06	10,95	10,98	11,41	11,26
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	14,15	14,44	13,34	13,80	14,94
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	13,65	13,54	13,29	13,14	15,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,85	2,90	2,57	2,49	2,60
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,87	5,90	6,43	6,34	5,82
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,13	4,97	5,12	5,10	4,81
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,81	5,97	6,03	5,88	5,60
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,36	0,36	0,35	0,34	0,37
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,66	5,51	5,92	5,75	5,28
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,13	3,20	3,66	3,57	3,41
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,86	1,86	2,10	2,10	1,98
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,69	1,74	1,64	1,56	1,65
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS kota Bandar Lampung, 2023

PDRB Kota Bandar Lampung selain menunjukkan pertumbuhan ekonomi, juga dapat menggambarkan struktur ekonomi. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total. Dari 21 Lapangan usaha sebagaimana Tabel di atas, maka masing-masing sector memberikan kontribusinya berdasarkan potensi dan kebutuhan serta kondisi di daerahnya masing-masing. Sebagai wilayah perkotaan, maka haring

sector industry pengolahan dan perdagangan mendominasi struktur perekonomian daerah.

Dari Tabel 1.8 di atas, dapat dilihat bahwa sharing sektor yang terbesar berasal dari lapangan usaha industry pengolahan (19,88%), transportasi dan pergudangan (15,22%), perdagangan besar dan eceran (11,26%), dan konstruksi sebesar (11,26%), sedangkan sektor yang paling rendah kontribusinya adalah penadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah (0,11%) dan limbah (0,28%)

c. Laju Inflasi

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis.

Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas dasar Harga

Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung inflasi Tahun 2021 mencapai angka 2,13%, sedangkan Tahun 2022 angka inflasi sebesar 5,52%, terjadi peningkatan sebesar 2,59%. Laju inflasi Kota Bandar Lampung untuk tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini :

TABEL 1.9
LAJU INFLASI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020-2022

NO	TAHUN	%
1	2020	1,93
2	2021	2,13
3	2022	5,52

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Dalam skala makro/ nasional, penyebab meningkatnya angka inflasi lebih karena terjadinya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Makanan dan minuman, tembakau;
2. Pakaian dan alas kaki;
3. Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.

Berdasarkan data dari BPS, selama Tahun 2022 ketiga sektor ini menyumbang inflasi di Kota Bandar Lampung. Adapun laju inflasi bulanan menurut kelompok pengeluaran dapat di lihat pada Tabel berikut.

TABEL 1.10

LAJU INFLASI BULANAN MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN

Bulan Month	Makanan, Minuman dan Tembakau Food, Beverages and Tobacco	Pakaian dan Alas Kaki Clothing and Footwear	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Housing, Water, Electricity, and Household Fuels
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	0,24	0	0,47
Februari/February	-1,42	0	-0,02
Maret/March	2,64	0,48	0,02
April/April	1,36	0	0,01
Mei/May	1,11	0	0,04
Juni/June	3,36	0	0,11
Juli/July	1,68	0	0,19
Agustus/August	-2,88	0	0,17
September/September	-0,45	3,6	0,59
Oktober/October	-2,41	0,13	0
November/November	-0,31	0,17	0,36
Desember/December	1,88	0,14	-0,05

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

d. Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung sebanyak 90,51 ribu orang. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1.11

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2022

Komponen Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Garis Kemiskinan Kapita Perbulan (Rupiah)	634.743	654.576	698.598
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	93,74	98,76	90,51
Penduduk Miskin (Persen)	8,81	9,11	8,21

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

TABEL 1.12**DATA GARIS KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 – 2022**

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	450 014	102,27	10,67
2015	476 055	100,80	10,33
2016	502 968	100,54	10,15
2017	540 679	100,50	9,94
2018	562 277	93,04	9,04
2019	588 177	91,24	8,71
2020	634 743	93,74	8,81
2021	654 576	98,76	9,11
2022	698 598	90,51	8,21

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Garis kemiskinan per rupiah/kapita Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari Rp. 654.576,- menjadi Rp. 698.598,- sedangkan jumlah penduduk miskin turun dari 98.760 orang pada tahun 2021 menjadi 90.510 orang atau mengalami penurunan hingga 9,11%. Secara persentase pun mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung sebanyak 9,1 % dari jumlah penduduk menjadi 8,21% dari jumlah penduduk.

Penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari banyaknya terobosan dan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan *recovery* dan peningkatan perekonomian daerah dengan mendorong peran UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi di daerah melalui kemudahan perizinan dan berusaha di Kota Bandar Lampung.

1.4.2. Aspek Strategis Pembangunan Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan tahun 2022 ditujukan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Bandar Lampung yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026. Program dan kegiatan prioritas yang terakomodir di setiap bidang atau sektor pembangunan diharapkan mampu mencerminkan adanya kesatuan pembangunan antara aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek tata ruangan infrastruktur Kota Bandar Lampung. Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi. Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022, selanjutnya tema pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Pemanfaatan Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Perdagangan dan Jasa Serta Peningkatan Kualitas SDM”**.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah, maka penyusunan prioritas pembangunan perlu dilakukan mengingat upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan masing-masing isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan sumber daya manusia. Untuk itu prioritas pembangunan harus merupakan upaya terpilih yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada masing-masing isu secara optimal pada tahun 2022.

Prioritas Pembangunan Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021– 2026. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 di Kota Bandar Lampung masih diarahkan pada upaya lanjutan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Deases

2019, terutama pada dukungan penanganan kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi, sehingga dirumuskan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 yaitu :

1. Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui peningkatan sektor-sektor strategis daerah;
2. Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan;
4. Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM;
5. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah.

1.4.3. Isu Strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan analisis permasalahan Kota Bandar Lampung terdapat 13 (tiga belas) isu strategis yang terdiri dari :

1. Penanganan Pandemi Covid-19 Beserta Dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19 yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan - China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19.

Sejak Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, banyak kebijakan dan strategi dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian signifikan akibat penyakit ini. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi force majeure yang

mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh stakeholder diantaranya adalah pemerintah daerah (Pemda).

Pandemi Corona Virus Disease 19 atau Covid-19 yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga kedepan seluruh stakeholder dan Pemerintah Daerah masih perlu merespon dengan cepat penanganan pandemi ini termasuk juga penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari adanya Covid-19.

Menyusun perencanaan di tengah suasana yang tidak pasti tentu saja dibutuhkan langkah strategis untuk dapat menangani wabah Covid-19 tersebut. Kita berharap tentunya krisis Covid-19 ini segera berakhir, namun kita juga harus bersiap-siap jika skenario masih berlanjut. Jika pada Tahun 2020 krisis ini selesai, maka di beberapa tahun kedepan kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Namun disamping itu Pemerintah Daerah juga harus bersiap diri jika pandemi ini masih terus berlanjut dan obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar Pemerintah Daerah dapat melindungi setiap nyawa warganya.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta tingkat kesejahteraan yang lebih baik biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas SDM merupakan salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM maka masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan harus diatasi.

Kondisi pendidikan di Kota Bandar Lampung secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat. Beberapa isu strategis dan kursorial dalam bidang Pendidikan yang masih sangat relevan hingga saat ini adalah; (i) Mutu atau kualitas pendidikan, (ii) Penguatan Sumber Daya Manusia-SDM, (iii) Perluasan akses pendidikan, dan (iv) Menghadirkan tatakelola pendidikan dalam bentuk Integrated System berbasis Teknologi Informasi.

Dalam menghadapi tantangan ke depan dengan adanya globalisasi maka perlu memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Oleh karena itu, Peningkatan Kualitas Pendidikan bagi semua kalangan, yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan termasuk perpustakaan dan laboratorium, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan. Disamping itu treatment terhadap sekolah dan madrasah dalam berbagai hal harus diberlakukan sama.

Kualitas SDM perempuan dan generasi muda juga tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, untuk itu pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan peningkatan SDM generasi muda juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian.

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan salah satu isu penting. Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat masih menjadi persoalan di Kota Bandar Lampung dan membutuhkan penanganan yang komprehensif

khususnya bagi masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus. Kasus kematian ibu, bayi dan balita serta kasus gizi buruk masih terjadi dan memerlukan penanganan. Angka kematian bayi bagi masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin.

Penduduk miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seluruhnya harus menjadi tanggungjawab pemerintah, meskipun demikian dalam implementasinya masih ada penduduk miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan berbagai sebab, antara lain data base yang digunakan masih ada perbedaan persepsi, dan juga mekanisme pelayanan rujukan dan klaim yang belum sesuai. Selain itu fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan bagi peyandang cacat dan lansia belum memadai. Pelayanan kesehatan bukan hanya proses pengobatan yang diberikan kepada masyarakat saat berada di Puskesmas atau rumah sakit, namun jauh sebelum itu yakni bagaimana cara pencegahan penyakit dan menerapkan pola hidup sehat bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dirasa masih kurang. Selaras dengan isu strategis pembangunan kesehatan yang menjadi arahan Presiden, maka penurunan Angka Stunting, Angka Kematian Ibu dan Bayi, perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan, Penguatan Pelayanan Kesehatan serta isu terkait obat dan alat kesehatan menjadi isu pembangunan Kesehatan Kota Bandar Lampung yang memerlukan penanganan kedepan. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung dengan mengedepankan upaya promotif, preventif, kuratif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus menjadi perhatian Pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

3. Masalah Transportasi dan Kemacetan

Sebagai ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menghadapi permasalahan transportasi yang kompleks akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi sistem transportasi Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun semakin mengalami perubahan ke arah yang mengkhawatirkan. Munculnya persoalan-persoalan transportasi seperti kemacetan lalu lintas, masalah parkir, angkutan umum dan sebagainya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan transportasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan moda transportasi dan penyediaan utilitas dan infrastruktur yang memadai. Permasalahan transportasi di Kota Bandar Lampung secara teknis disebabkan antara lain kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan khususnya kendaraan pribadi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda. Permasalahan yang paling mendasar adalah menyangkut kapasitas jalan yang sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota Bandar Lampung. Penambahan ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan. Hampir semua ruas jalan arteri di Kota Bandar Lampung sudah mengalami kemacetan terutama pada jam-jam tertentu.

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu. Memang beberapa tahun terakhir telah dilakukan penambahan armada Bus Rapid Transit (BRT), namun pengadaan bus tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sedangkan untuk angkutan kota (angkot) yang merupakan moda transportasi yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi feeder ke kawasan pemukiman, peremajaan dan revitalisasinya masih belum optimal.

Faktor lain yang menyebabkan kemacetan adalah rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidaksiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas. Rendahnya tingkat kedisiplinan salah satunya juga didorong oleh minimnya pelibatan masyarakat secara luas dalam perencanaan program transportasi.

4. Penanggulangan Banjir, Rob dan Genangan

Banjir merupakan masalah yang berulang setiap tahun di Kota Bandar Lampung yang bisa terjadi hingga lima kali dalam setahun. Rentannya Kota Bandar Lampung terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Kota Bandar Lampung serta aliran 2 sungai besar dan 23 sungai-sungai kecil di dalam wilayahnya. Disamping itu adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi di wilayah Kota Bandar Lampung serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Kota Bandar Lampung sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (stake holder) terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga perlu mengantisipasi fenomena banjir rob yang disebabkan oleh pasang surut

air laut maupun penurunan muka tanah pada beberapa kawasan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pembangunan tanggul laut dan tanggul muara sungai.

5. Kawasan kumuh, Permukiman Liar dan Rumah Tidak Layak Huni.

Urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang cepat berkontribusi pada munculnya permukiman informal di Kota Bandar Lampung. Sebagai pusat kegiatan di Provinsi Lampung, sekitar 12.4% populasi Provinsi berada di Bandar Lampung. Bandar Lampung melayani berbagai area di sekitarnya, baik dalam hal pemerintahan, perdagangan, layanan keuangan, pendidikan dan lain sebagainya. Perannya sebagai pusat pertumbuhan didukung oleh rencana untuk meningkatkan aksesibilitas ke dan dari Kota Bandar Lampung.

Ada tujuh indikator area kumuh yaitu :

- 1) kumuh dalam hal bangunan;
- 2) jalan lingkungan;
- 3) pasokan air minum;
- 4) drainase dan lingkungan;
- 5) pengelolaan air limbah;
- 6) pengelolaan limbah padat;
- 7) perlindungan dari kebakaran.

KOTAKU Bandar Lampung mencatat bahwa terdapat 18 kelurahan di kota yang masuk dalam kategori area kumuh terutama permukimannya. Kelurahan-kelurahan ini adalah: Bumi Kedamaian, Way Gubak, Way Laga, Ketapang, Campang Raya, Kangkung, Sawah Berebes, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Way Dadi Baru, Kaliawi Persada, Pasir Gintung, Kebon Jeruk, Pesawahan, Kaliawi, Kelapa Tiga, dan Gulak Galik. Pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan pelaksanaan program termasuk satu data, satu peta dan satu dokumen perencanaan untuk semua yang berkaitan dengan area kumuh. Saat masa pelaksanaan, sinkronisasi dan harmonisasi antara aktor/sektor, sumber pendanaan, infrastruktur yang

harus memenuhi standar harus dipertimbangkan dalam menangani kawasan kumuh dan permukiman informal.

6. Masalah Penataan Ruang

Upaya penataan ruang kota seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan penggunaan lahan yang efektif sehingga menimbulkan kesemrawutan kota, yang terwujud dalam penggunaan tempat-tempat umum bagi kegiatan PKL, seperti trotoar/pinggir jalan, taman, terminal/stasiun ataupun kolong jembatan. Keterbatasan wahana atau tempat untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sosial budaya, seperti untuk berinteraksi dan mengejawantahkan aspirasi-aspirasi sosial budayanya ataupun keterbatasan sarana rekreasi yang murah menyebabkan penduduk kota menggunakan jalan atau gang sempit sebagai tempat bermain sepakbola. Permukiman kumuh tumbuh di berbagai sudut kota, khususnya di sempadan sungai, jalur kereta api dan di lahan-lahan kosong. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Bandar Lampung akan menyebabkan kampung-kampung kota semakin sesak, tidak sehat dan rawan kriminalitas.

7. Peningkatan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakatnya. Masalah ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung ditandai oleh beberapa ketidakseimbangan yang dasar. Pertama adalah ketidak-seimbangan secara umum antara penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan lapangan kerja. Jumlah yang dibutuhkan melebihi jumlah yang dapat disediakan. Kedua adalah kekurangseimbangan antara kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dengan penyediaan tenaga terdidik. Ketiga adalah adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus merumuskan solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di Kota Bandar Lampung. Mulai dari membuat regulasi dan kebijakan serta menjaga sinergi antara pemerintah daerah dengan pengusaha; pengembangan sektor-sektor ekonomi seperti Jasa, konstruksi, Pariwisata, industri dan UMKM yang diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penyerapan sumberdaya daerah serta meningkatkan ekspor produk dan jasa yang dihasilkan; hingga pemberian bantuan bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun pemberian bantuan finansial.

Termasuk kesiapan daerah dalam memasuki Era industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi otomatisasi tinggi yang ditopang infrastruktur berbasis internet dan ekonomi digital, akan ada banyak peran yang tergantikan dalam disrupsi besar tersebut. Manusia yang tidak terampil dan peka terhadap perubahan menganggap itu semua sebagai ancaman dan mimpi buruk, karena pekerjaan dengan kemampuan sangat mudah akan diambil alih oleh mesin. Oleh karena itu, kesiapan daerah untuk memasuki era industri 4.0 yang akan mempengaruhi kinerja sektor-sektor strategis daerah menjadi isu yang sangat penting dan perlu untuk direspon.

8. Masalah Kemiskinan dan PMKS

Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama dan menjadi isu pembangunan Kota Bandar Lampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung selama tahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tingginya angka kemiskinan dibanding wilayah lainnya yg sudah baik mengisyaratkan pada kita bahwa Bandar Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Berdasarkan data BPS Tahun 2020, dari 1.166.066 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung sekitar 8,81 persen atau sebesar 93.740 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan secara umum dilihat atas dasar pemenuhan kebutuhan atau materi yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi suatu rumah tangga dengan jumlah minimum kebutuhan hidup. Akan tetapi saat ini kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, persoalan munculnya jutaan anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan sosial, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan sangat terbatas.

Oleh karena itu, kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung yang pro kemiskinan yang dapat memberikan aktifitas-aktifitas secara langsung untuk pengentasan kemiskinan disegala bidang/sector perlu untuk terus diperhatikan, termasuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

9. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kota Bandar Lampung. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan.

Isu dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu isu terkait kondusivitas dan stabilitas daerah, dengan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis serta mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sehingga masalah Ketertiban dan ketentraman serta Keindahan (K3) menjadi lebih kompleks. Selain itu keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan Partai Politik yang ada di lingkungan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal, masih banyak organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Kondisi ketentraman, ketertiban umum dipengaruhi oleh kenaikan jumlah demo yang terjadi dan dapat menyebabkan potensi konflik sosial. Kejadian kriminalitas maupun demo tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung, menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan perhatian lebih untuk menjamin Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

10. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ini lalu dibuatkan Road Map Reformasi

Birokrasi yang terbagi dalam beberapa fase dimana Tahun 2020 Reformasi Birokrasi akan masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai GDRB 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Selanjutnya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 secara operasional diturunkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam rangka menjalankan program Reformasi Birokrasi pada kedua fase yang sudah berjalan, ditetapkanlah delapan area perubahan, yaitu mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, kualitas SDM, dan pelayanan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan, dimana hal ini dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan.

Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik, termasuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dipandang sebagai konsekwensi logis dari serangkaian perubahan-perubahan yang sudah dilakukan terkait reformasi birokrasi.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari high cost economy diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

11. Pengembangan dan Penguatan Inovasi Daerah

Pengembangan dan Penguatan Inovasi Daerah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sering kali dikaitkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah telah berhasil meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonominya dengan signifikan melalui penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas iptek. Namun, pengembangan Iptek saja tidak cukup, karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah. Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan penelitian dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keunggulan komparatif Kota Bandar Lampung menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah dan masyarakat menjadi basis penting dalam keberlanjutan pembangunan.

12. Masalah Lingkungan Hidup

Masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat kota meliputi aspek fisik seperti kualitas udara, air dan tanah masih menjadi perhatian yang membutuhkan penanganan kedepan.

Polusi udara buruk karena BBM yang masih mengandung timbal dan asap kendaraan yang tidak tersaring baik, polusi suara juga semakin terasa karena bunyi mesin kendaraan umum yang melebihi ambang toleransi. Sementara itu air tanah yang menjadi sumber bagi sebagian penduduk kota kualitasnya terganggu karena tercemar limbah rumah tangga dan industri. Masalah persampahan, masalah sanitasi kota, serta kualitas air yang kurang baik masih menjadi momok bagi Kota Bandar Lampung. Masih banyak warga yang secara sadar membuang sampah dan limbah ke sungai sehingga mengundang adanya bencana seperti banjir dan rusaknya ekosistem sungai akibat tercemar oleh zat-zat kimia yang beracun.

Produksi limbah di Kota Bandar Lampung cenderung meningkat setiap tahunnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa produksi limbah yang masuk ke TPA Bakung pada tahun 2019 mencapai 1.000 ton/hari, sehingga dapat diperkirakan volume limbah pada tahun 2019 adalah sekitar 365.000 ton. Dengan mempertimbangkan angka ini, TPA Bakung memiliki potensi besar untuk menghasilkan gas rumah kaca (GRK). Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa TPA Bakung menghasilkan 788.404 m³ gas metana pada tahun 2018. Dari perhitungan potensi gas metana setiap tahunnya di TPA ternyata cukup besar dan jumlah ini terus meningkat pada setiap tahunnya. Peningkatan paling signifikan diperkirakan terjadi pada tahun 2019 yang mana terdapat peningkatan 567.397 m³ volume gas metana dari tahun sebelumnya.

Pengelolaan limbah di daerah pesisir Kota Bandar Lampung cukup mengkhawatirkan. Garis pesisir telah diperluas ke arah laut karena

masyarakat setempat menggunakan limbah rumah tangga sebagai bahan baku tempat pembuangan akhir di sepanjang garis pantai. Praktik 'reklamasi sampah' ini terus terjadi sampai saat ini. Polusi air laut di Teluk Lampung karena limbah diduga telah membunuh habitat dan ekosistem laut. Hasil tangkapan ikan oleh nelayan juga semakin menurun, dan banyak sampah plastik yang tersangkut pada jaring nelayan. Data Dinas Lingkungan Provinsi Lampung pada tahun 2019 menyebutkan bahwa 80 persen sampah di pesisir pantai Bandar Lampung datang dari darat. Tidak hanya dari masyarakat pesisir, limbah ini dari Koala, Way Lunik, dan Kuripan. Limbah ini menumpuk di Teluk Lampung tidak hanya dari hulu Bandar Lampung tapi juga dari luar kawasan Bandar Lampung.

Kondisi lingkungan perumahan seperti kekumuhan, kepadatan yang tinggi, lokasi yang tidak memadai serta kualitas dan keselamatan bangunannya mengakibatkan menurunnya kualitas permukiman yang disertai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan clean land, clean water dan clean air di Kota Bandar Lampung perlu terus dilakukan karena kualitas lingkungan yang buruk akan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, berkurangnya ruang terbuka hijau, dampak perubahan iklim serta upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama.

13. Bencana Alam

Kota Bandar Lampung secara topografis dan geografis adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana. Saat ini wilayah Kota Bandar Lampung memiliki beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai

kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir Berdasarkan data BNPB, Indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2020 menunjukkan angka 182 dengan kategori Tinggi.

Dalam menghadapi ancaman bencana perlu dilakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dengan pembentukan Kelurahan siaga bencana. Upaya mitigasi struktural adalah dengan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana. Namun demikian kelurahan siaga bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya memenuhi kriteria utama, hal ini mengakibatkan kejadian bencana masih menimbulkan resiko yang tinggi. Selain itu adaptasi terhadap perubahan iklim di masyarakat juga perlu untuk disosialisasikan.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Sub Bab ini mengevaluasi dan menganalisa atas pelaksanaan capaian kinerja tahun 2022

C. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2022.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN **K**INERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 adalah penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pemerintahan daerah tahun 2022, yang merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021– 2026. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah, dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026 yang memiliki Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Visi Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yaitu :

"Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman

Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat "

Pernyataan **VISI** Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- BANDAR LAMPUNG** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
- SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
- CERDAS** : Sikap dan kondisi masyarakat Kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
- BERIMAN** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
- BERBUDAYA** : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
- NYAMAN** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat

- UNGGUL** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung
- BERDAYA SAING** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

Dalam rangka mencapai Visi dimaksud dirumuskan Misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Misi Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.**
- 2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.**
- 3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.**
- 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.**
- 5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.**

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA : **Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.** Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA : **Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.** Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA : **Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.** Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang

- MISI KEEMPAT** : **Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.** Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
- MISI KELIMA** : **Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.** Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.
- MISI KEENAM** : **Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.** Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan dan sasaran dalam setiap Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu :

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN PADA SETIAP MISI

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Seluruh Masyarakat. 1.1.3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas	3.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan. 3.1.2. Meningkatnya pengendalian banjir. 3.1.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak. 3.1.4. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang. 3.1.5. Menurunnya masalah kemacetan

4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1. Meningkatnya sektor unggulan daerah 4.1.2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious	5.1. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan NilaiNilai Budaya	5.1.1. Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama. 5.1.2. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung. 6.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. 6.1.3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah. 6.1.4. Terciptanya Inovasi Layanan Publik. 6.1.5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	7.1. Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. 7.1.2. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

TABEL 2.2.

**HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

VISI : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Seluruh Masyarakat. 1.1.3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas	3.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan. 3.1.2. Meningkatnya pengendalian banjir. 3.1.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak. 3.1.4. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang. 3.1.5. Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah 4.1.2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja 4.1.3. Menurunnya kemiskinan 4.1.4. Meningkatnya penanganan PMKS
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious	5.1. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama 5.1.2. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung 6.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 6.1.3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 6.1.4. Terciptanya Inovasi Layanan Publik 6.1.5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1. Terwujudnya keseimbangan lingkungan pembangunan berkelanjutan dan	7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.3. Strategi, Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Daerah

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

A. Strategi

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program- program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan. Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus

dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
- 2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategik. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Rumusan Strategi untuk mencapai Misi adalah sebagai berikut :

a. Strategi Misi Kesatu:

1. Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2. Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

b. Strategi Misi Kedua

1. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif;
2. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai;
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas;
4. Meningkatkan Pembangunan Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual;

c. Strategi Misi ketiga :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
2. Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan
3. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau
4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang
5. Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh.

d. Strategi Misi keempat :

1. Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT.
2. Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen
3. Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu
4. Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru
5. Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi
6. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja
7. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan.

8. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program- program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
 9. Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS.
- e. Strategi Misi Kelima :
1. Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah
 2. Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan
 3. Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah.
- f. Strategi Misi Keenam :
1. Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
 3. eningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 4. Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang
 5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis.
- g. Strategi Misi Ketujuh :
1. Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim
 2. Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

B. Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2022

Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Tema Pembangunan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah :

“Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Perdagangan dan Jasa Serta Peningkatan Kualitas SDM” dengan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui peningkatan sektor-sektor strategis daerah;
2. Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan;
4. Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM;
5. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah.

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2022 berdasarkan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021- 2026 beberapa diantaranya yaitu :

1. Mengembangkan sektor industri dengan menumbuh kembangkan industri kecil menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang produktif, berdaya saing, tahan krisis, dan padat karya serta optimalisasi peran sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja lokal;
2. Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representative;
3. Meningkatkan kualitas jasa transportasi, perdagangan, keuangan dan jasa lainnya;
4. Mendorong penguatan kelembagaan dan meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar;

5. Optimalisasi promosi investasi untuk publikasi potensi disertai kemitraan investasi;
6. Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal;
7. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja;
8. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat;
9. Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi;
10. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk masyarakat;
11. Pengembangan profesionalitas SDM Kesehatan baik medis, paramedis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi;
12. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan termasuk pencegahan kasus baru penyakit menular, penyakit tidak menular dan kejadian luar biasa/wabah;
13. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat dengan menjamin ketersediaan sarana, prasarana, alat dan obat kontrasepsi dengan fokus pada penurunan *unmet need* dan resiko drop out KB;
14. Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja;

15. Meningkatkan sistem jaringan transportasi jalan dan jembatan terutama untuk mengurai kemacetan dengan membangun dan meningkatkan jalan kota, jalan lingkungan dan jalan-jalan alternative;
16. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan dan jembatan secara berkala, serta penanganan pemeliharaan secara responsif;
17. Membangun infrastruktur gedung pemerintahan;
18. Mengurangi luas genangan dan mengendalikan banjir melalui normalisasi sungai;
19. Pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sistem drainase secara terpadu;
20. Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui penanganan RTLH dengan pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pemberdayaan masyarakat;
21. Mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan sarana infrastruktur dasar permukiman dan lingkungan sehat permukiman;
22. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang Hunian;
23. Pemenuhan Ketersediaan Perencanaan Tata Ruang yang Efektif, Spesifik dan Harmonis;
24. Meningkatkan pengawasan kesesuaian Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW;
25. Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pertanahan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan;
26. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan;
27. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
28. Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menyeluruh;

29. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu dengan penataan taman-taman dan kawasan hijau kota yang ramah lingkungan;
30. Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu;
31. Membangun sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, serta pembangunan infrastruktur tanggap darurat penanggulangan bencana;
32. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik dengan mendorong pelaksanaan kurikulum secara baik, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT, termasuk menyediakan bahan ajar dengan muatan lokal dan menanamkan karakter sejak dini melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
33. Pengembangan anak usia dini yang menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh dan terintegrasi antar lembaga layanan terkait dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD;
34. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah;
35. Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat;
36. Mendorong pemahaman pemangku kepentingan, perencana dan pelaksana pembangunan terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus penguatan partisipasi perempuan dalam segala lini;
37. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan sebagai leader di berbagai bidang;
38. Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan;
39. Meningkatkan peranserta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
40. Melakukan penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan;

41. Meningkatkan sinergitas, toleransi, dan peranserta stakeholders bersama sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan, ketertiban umum;
42. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi SDM perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah khususnya terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan);
43. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan perilaku keagamaan di masyarakat;
44. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama;
45. Meningkatkan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap kerawanan konflik sosial, agama dan RAS;
46. Melestarikan dan mengembangkan kesenian, sejarah, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal melalui aktivitas seni dan promosi;
47. Meningkatkan pemeliharaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda, situs, kawasan cagar budaya daerah;
48. Mendorong perubahan mental aparatur untuk menciptakan budaya kerja dan profesionalitas sumber daya aparatur;
49. Memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah;
50. Menerapkan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya;
51. Menerapkan sistem tatalaksana/tatakerja birokrat dengan proses yang singkat dan jelas dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
52. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan satu pintu, termasuk pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
53. Menyediakan layanan pajak dan retribusi yang mudah, cepat dan akurat berbasis IT;
54. Mengembangkan *e-government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

55. Memperkuat dan memperluas jangkauan teknologi komunikasi dan informatika;
56. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan publik;
57. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan pemerintahan di Kecamatan;

Sandingan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1. Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui peningkatan sektor-sektor strategis daerah	1. Mengembangkan sektor industri dengan menumbuh kembangkan industri kecil menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang produktif, berdaya saing, tahan krisis, dan padat karya serta optimalisasi peran sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja lokal
	2. Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representative
	3. Meningkatkan kualitas jasa transportasi, perdagangan, keuangan dan jasa lainnya
	4. Mendorong penguatan kelembagaan dan meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar
	5. Optimalisasi promosi investasi untuk publikasi potensi disertai kemitraan investasi
	6. Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal
	7. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja
	8. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
	9. Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi

<p>2. Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk masyarakat 2. Pengembangan profesionalitas SDM Kesehatan baik medis, paramedis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi 3. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan termasuk pencegahan kasus baru penyakit menular, penyakit tidak menular dan kejadian luar biasa/wabah 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat dengan menjamin ketersediaan sarana, prasarana, alat dan obat kontrasepsi dengan fokus pada penurunan <i>unmet need</i> dan resiko drop out KB 5. Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja
<p>3. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem jaringan transportasi jalan dan jembatan terutama untuk menguraikemacetan dengan membangun dan meningkatkan jalan kota, jalan lingkungan dan jalan-jalan alternative 2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan dan jembatan secara berkala, serta penanganan pemeliharaan secara responsive 3. Membangun infrastruktur gedung pemerintahan 4. Mengurangi luas genangan dan mengendalikan banjir melalui normalisasi sungai 5. Pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sistem drainase secara terpadu 6. Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui penanganan RTLH dengan melibatkan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pemberdayaan masyarakat 7. Mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan sarana infrastruktur dasar permukiman dan lingkungan sehat permukiman 8. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang Hunian 9. Pemenuhan Ketersediaan Perencanaan Tata Ruang yang Efektif, Spesifik dan Harmonis 10. Meningkatkan pengawasan kesesuaian Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW

	<p>11. Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pertanahan untuk menyalurkan pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>12. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan</p> <p>13. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan</p> <p>14. Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menyeluruh</p> <p>15. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu dengan penataan taman-taman dan kawasan hijau kota yang ramah lingkungan</p> <p>16. Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu</p> <p>17. Membangun sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, serta pembangunan infrastruktur tanggap darurat penanggulangan bencana</p>
4. Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM	<p>1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik dengan mendorong pelaksanaan kurikulum secara baik, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis it, termasuk menyediakan bahan ajar dengan muatan lokal dan menanamkan karakter sejak dini melalui <i>multigrade</i> dan/atau <i>multisubject teaching</i></p> <p>2. Pengembangan anak usia dini yang menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh dan terintegrasi antar lembaga layanan terkait dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD</p> <p>3. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah</p> <p>4. Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat</p> <p>5. Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan, Perencana dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep Kesetaraan Gender dengan Fokus Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Segala Lini</p> <p>6. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan sebagai leader di berbagai bidang</p> <p>7. Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan</p> <p>8. Meningkatkan peranserta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama</p> <p>9. Melakukan penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan</p>

5. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	1. Meningkatkan sinergitas, toleransi, dan peranserta stakeholders bersama sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan, ketertiban umum
	2. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi SDM perlindungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah khususnya terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	3. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan perilaku keagamaan di masyarakat
	4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama
	5. Meningkatkan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap kerawanan konflik sosial, agama dan RAS
	6. Melestarikan dan mengembangkan kesenian, sejarah, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal melalui aktivitas seni dan promosi
	7. Meningkatkan pemeliharaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda, situs, kawasan cagar budaya daerah
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	1. Mendorong perubahan mental aparatur untuk menciptakan budaya kerja dan profesionalitas sumber daya aparatur
	2. Memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah
	3. Menerapkan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya
	4. Menerapkan sistem tatalaksana/tatakerja birokrat dengan proses yang singkat dan jelas dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
	5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan satu pintu, termasuk pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	6. Menyediakan layanan pajak dan retribusi yang mudah, cepat dan akurat berbasis it
	7. Mengembangkan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	8. Memperkuat dan memperluas jangkauan teknologi komunikasi dan informatika
	9. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan publik
	10. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

**2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam perjanjian kinerja dijabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan setelah pengesahan dokumen anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

TABEL 2.3.**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	Tahun
				1.2. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	Persen
				1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	Persen

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		2. Meningkatkan Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	Tahun
				2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	Tahun
			3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1. Indeks Pembangunan Gender	93,88	Angka
				3.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Tingkat Capaian
				3.3. Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	Persen
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,81	Persen
				5. Meningkatnya pengendalian banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0
			6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak		6.1. RTLH yang tertangani pertahun	23,63
				6.2. Persentase Kawasan Kumuh	0,890	Persen
			7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	Persen
8. Menurunnya masalah kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	50,00	Persen			
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	9. Meningkatnya Sektor unggulan daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	Persen
				9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	Persen
				9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	Persen

1	2	3	4	5	6	7
				9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	Persen
				9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	Persen
			10. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,99	Persen
				10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	Persen
				10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	Persen
			11. Menurunnya kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,43	Persen
				11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	Juta Rp
			12. Meningkatnya penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	77,00	Persen
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	13. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.531	Angka
				13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,50	Persen
			14. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40,00	Persen
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	15. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	Skor

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

1	2	3	4	5	6	7
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16.1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	61,43	Angka
			17. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	17.1. Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	Angka

Sumber : Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung 2022, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun.

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah:

- ❖ Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- ❖ Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- ❖ Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- ❖ Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan.
- ❖ Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
- ❖ Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026).

Untuk melihat keberhasilan atau ketidak berhasilan kinerja Pemerintah maka dapat dilihat capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.1**SKALA YANG DIGUNAKAN BILAMANA INDIKATOR SASARAN
MEMPUNYAI MAKNA PROGRES POSITIF**

NO	RATA-RATA CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	≥ 100	SANGAT BAIK
2	80-99	BAIK
3	65-79	CUKUP
4	51-64	KURANG
5	≤ 50	SANGAT KURANG

TABEL 3.2**SKALA YANG DIGUNAKAN BILAMANA INDIKATOR SASARAN
MEMPUNYAI MAKNA PROGRES NEGATIF**

NO	RATA-RATA CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	≥ 100	SANGAT KURANG
2	80-99	KURANG
3	65-79	CUKUP
4	51-64	BAIK
5	≤ 50	SANGAT BAIK

Ada 31 indikator kinerja utama dalam menggambarkan kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung yang secara umum dibagi dalam 17 sasaran strategis utama yaitu :

TABEL 3.3**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	Tahun
	1.2. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	Persen
	1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	Persen
2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	Tahun
	2.3. Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	Tahun
3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1. Indeks Pembangunan Gender	93,88	Angka
	3.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Tingkat Capaian
	3.3. Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	Persen

1	2	3	4
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,81	Persen
5. Meningkatnya pengendalian banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0	Persen
6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	23,63	Persen
	6.2. Persentase Kawasan Kumuh	0,890	Persen
7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	Persen
8. Menurunnya masalah kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	50,00	Persen
9. Meningkatnya Sektor unggulan daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	Persen
	9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	Persen
	9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	Persen
	9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	Persen
	9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	Persen
10. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,99	Persen
	10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	Persen
	10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	Persen
11. Menurunnya kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,43	Persen
	11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	Juta Rp
12. Meningkatnya penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	77,00	Persen
13. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.531	Angka
	13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,50	Persen
14. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40,00	Persen
15. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	Skor
16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16.1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	61,43	Angka
17. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	17.1. Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	Angka

Adapun realisasi dari target indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

TABEL 3.4
REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	71,66	Tahun
	1.2. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	5,16	Persen
	1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	2,13	Persen
2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	10,96	Tahun
	2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	14,71	Tahun
3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1. Indeks Pembangunan Gender	93,88	93,93*	Angka
	3.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Tingkat Capaian
	3.3. Persentase Pemuda Berprestasi	9,61		Persen
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,81	89,95	Persen
5. Meningkatnya Pengendalian Banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0	84	Persen
6. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	23,63	0	Persen
	6.2. Persentase Kawasan Kumuh	0,890	0,89	Persen
7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	54,65	Persen
8. Menurunnya Masalah Kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	50,00	40	Persen
9. Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	21,09	Persen
	9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	14,94	Persen
	9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	14,82	Persen
	9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	30,54	Persen
	9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	18,83	Persen

1	2	3	4	5
10. Meningkatnya Investasi dan Memperluas Kesempatan Kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,99	43,94	Persen
	10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	24,77	Persen
	10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	7,91	Persen
11. Menurunnya Kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,43	91,79	Persen
	11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	56.152.000	Juta RP
12. Meningkatnya Penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	77,00	31,40	Persen
13. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.531	1.632	Angka
	13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,50	100	Persen
14. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40,00	40,00	Persen
15. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	58,77 (CC)	Skor
16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16.1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	61,43	58,86	Angka
17. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	17.1. Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	165,56*	Angka

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pencapaian sasaran pembangunan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD 2021 - 2026 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Dari 17 sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2022 , sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kota Bandar Lampung. 17 sasaran tersebut memiliki 31 indikator kinerja sasaran yang terdiri dari 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran untuk **Misi I**, 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sasaran untuk **Misi II**, 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran untuk **Misi III**, 4 sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 11 indikator untuk

Misi IV, 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran untuk **Misi V**, 1 sasaran dengan 1 indikator sasaran untuk **Misi VI**, dan 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran untuk **Misi VII**.

Pada tahun anggaran 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 17 sasaran dengan menggunakan 31 indikator kinerja sasaran, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Dari 31 indikator kinerja sasaran yang diukur, sebanyak 18 indikator kinerja sasaran (58,06%) mencapai atau melampaui target. Dan 13 indikator kinerja sasaran (41,94%) tidak mencapai target. Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada masing-masing misi.

MISI I

MENINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

SASARAN 1 :

MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN DAN TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Meningkatnya derajat kesehatan dan terkendalinya pertumbuhan penduduk merupakan Sasaran pada Misi 1. Adapun capaian pada misi 1, sasaran 1, 2 dan 3 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA SASARAN MISI I TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup	71,72	71,66	99,58	BAIK	BPS, Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	5,16	121	SANGAT BAIK	BPS, Dinas Kesehatan
		Laju pertumbuhan penduduk	1,109	2,13	7,21	SANGAT KURANG	BPS

Sasaran ini didukung oleh Angka Harapan Hidup (AHH), Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) dan Laju Pertumbuhan Penduduk. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu : Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup ini merupakan produk perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, untuk Kota Bandar Lampung angka harapan hidup tahun 2022 mempunyai target sebesar 71,72%. Realisasi targetnya yaitu 71,66% dengan capaian kinerja yang baik sebesar 99,91%. Persentase capaian meningkat dari tahun sebelumnya dengan capaian 99,58%. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya ingin mencapai angka harapan hidup yang tinggi saja namun sebaiknya dibarengi dengan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik, sehingga dalam usia yang mencapai 70 tahunan masih dalam kondisi yang sehat dan mandiri menjalankan aktifitas meskipun secara produktifitas sudah menurun.

Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (Persen) Balita merupakan kondisi dimana tubuh anak pendek atau sangat pendek. Banyak penyebab stunting ini, salah satunya adalah kondisi anak, khususnya anak yang berumur di bawah dua tahun (baduta) kurang gizi saat dalam kandungan ibunya.

Berdasarkan data diperoleh hasil jumlah kasus stunting anak yang berumur di bawah dua tahun di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 sebesar 5,16% (hasil penimbangan) atau sebanyak 924 bayi umur dibawah dua tahun. Angka realisasi ini sangat baik karena sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,50% dengan persentase capaian kinerja sebesar 121%. Untuk kedepannya Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung perlu mempertahankan bahkan lebih meningkatkan lagi program dan kegiatan yang dapat menurunkan kasus stunting dengan cara melakukan berbagai upaya yang diselaraskan dengan target standar pelayanan

minimal bidang kesehatan. Seperti kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan menurunkan angka kematian ibu dan balita serta perbaikan gizi masyarakat. Upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita dan perbaikan bagi anak gizi kurang sehingga kasus stunting ini lambat laun dapat terus dikurangi.

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Untuk mengetahui Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandar Lampung menggunakan laju pertumbuhan penduduk geometrik yang menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Data Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung secara resmi dikeluarkan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandar Lampung sebesar 2,13% dari target 2021 sebesar 1,109% dengan capaian kinerja masih sangat kurang yaitu sebesar 7,21%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya LPP tersebut adalah meningkatnya migrasi penduduk terutama yang berasal dari wilayah hinterland dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung, akibat wabah covid yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di desa serta meningkatnya utilitas dan prasarana perkotaan. Selain itu ditetapkan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat kegiatan Ekonomi Nasional, Pusat Pendidikan dan Perdagangan dan Jasa serta meningkatnya tingkat kelahiran.

Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk berimplikasi pada kemacetan lalu lintas, kerawanan sosial, penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dan ancaman meningkatnya kriminalitas akibat meningkatnya pengangguran serta kerawanan social jika migrasi penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung tidak memiliki pekerjaan dan pendidikan yang cukup. Selanjutnya capaian yang dicapai pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 untuk Misi 1 dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 3.6
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA MISI I TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya derajat kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup	71,72	71,42	99,58	71,72	71,66	99,58
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,60	6,65	99,24	6,50	5,16	121
		Laju pertumbuhan penduduk	1,109	0,8	127,86	1,109	2,13	7,21

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja untuk 3 sasaran dimaksud sangat baik, kecuali laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 hanya sebesar 0,8% sedangkan tahun 2022 sebesar 2,13 atau jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,109%.

TABEL 3.7
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI I TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya derajat kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup	71,66	72,23	99,21
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	5,16	6,20	116
		Laju pertumbuhan penduduk	2,13	1,109	7,21

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 telah berjalan dengan baik, angka harapan hidup sebesar 71,66% sedangkan target 2026 sebesar 72,23% atau telah terealisasi sebesar 99,21%. Sedangkan stunting mengalami peningkatan yang sangat baik, dari target akhir RPJMD 2026 sebesar 6,20 pada tahun 2022 telah dapat terealisasi sebesar 5,16% , hal ini berarti sasaran ini sudah tercapai. Sedangkan angka pertumbuhan penduduk masih harus di tekan agar laju pertumbuhan penduduk semakin terkendali.

TABEL 3.8
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI I TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya derajat kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup	71,72	71,66	99,58	Masyarakat sudah menyadari pentingnya pola hidup sehat	Intens melakukan Sosialisasi pola hidup sehat Penyediaan sarpras pelayanan kesehatan Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin di BL.
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	5,16	121	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pemenuhan gizi balita	Intens melakukan sosialisasi dan pemeriksaan terhadap ibu hamil dan ibu setelah melahirkan
		Laju pertumbuhan penduduk	1,109	2,13	7,21	Angka kelahiran (natalitas) dan juga imigran yang bertambah	1. Menekan angka kelahiran melalui program KB 2. Subsidi layanan kesehatan dan pendidikan bagimasyarakat Bandar Lampung yang memiliki KTP

MISI II

MENINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

SASARAN 1

MENINGKATNYA MUTU DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN BAGI SELURUH MASYARAKAT

Sasaran ini didukung oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui metode survey.

Kegunaan RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka Rata-rata Lama Sekolah dengan persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah Sangat Baik yaitu sebesar 100%. Pengukuran terhadap Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 mempunyai target yaitu 10,96 Tahun dan terealisasi sebesar 10,96 Tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, Harapan Lama Sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam. Hasil Pengukuran terhadap Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 14,71% dari target yang ditetapkan 16,14% dan capaian kinerja baik sebesar 91,14%.

Selain itu, tingkat kunjungan anak pada layanan perpustakaan baik pada ruang layanan perpustakaan maupun pada event event tertentu seperti Car Free Day, kegiatan UMKM dan kunjungan ke sekolah melalui mobil perpustakaan keliling mengalami peningkatan.

Adapun rasio pengunjung perpustakaan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,65% atau jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,27%. Peningkatan kunjungan anak pada layanan perpustakaan ini diharapkan berpengaruh terhadap tingkat literasi di Kota Bandar Lampung.

SASARAN 2

MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER, ANAK DAN GENERASI MUDA

Sasaran ini didukung oleh Indeks Pembangunan Gender dan Tingkat Capaian Kota Layak Anak serta Persentase Pemuda Berprestasi. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda dan Olahraga.

Indeks Pembangunan Gender telah menempati posisi cukup baik dibandingkan kabupaten Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

TABEL 3.9

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) dan INDEKS PEMBAGUNAN GENDER (IPG) MENURUT KOMPONEN dan KAB/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 dan 2022

No	Kabupaten / Kota	IDG 2021	IDG 2022	IPG 2021	IPG 2022
	PROPINSI LAMPUNG	67.96	67.96	90.37	90.37
1	Lampung Barat	69.14	69.14*	93.00	93.00*
2	Tanggamus	56.39	56.39*	90.98	90.98*
3	Lampung Selatan	59.27	59.27*	89.61	89.61*
4	Lampung Timur	63.14	63.14*	88.78	88.78*
5	Lampung Tengah	61.01	61.01*	89.94	89.94*
6	Lampung Utara	64.94	64.94*	89.58	89.58*
7	Way Kanan	61.82	61.82*	88.32	88.32*
8	Tulang Bawang	64.76	64.76*	89.56	89.56*
9	Pesawaran	73.70	73.70*	87.22	87.22*
10	Pringsewu	65.86	65.86*	92.29	92.29*
11	Mesuji	68.45	68.45*	84.37	84.37*
12	Tulang Bawang Barat	52.10	52.10*	88.96	88.96*
13	Pesisir Barat	54.93	54.93*	93.51	93.51*

14	Kota Bandar Lampung	71.69	71.69*	93.93	93.93*
15	Kota Metro	74.23	74.23*	95.89	95.89*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Angka IDG dan IPG Tahun 2022, akan realese pada Bulan Juni 2023

Angka IDG yang terlihat pada tabel 3.9 menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Pada tahun 2022 Kota Bandar Lampung masuk dalam urutan IDG ke 3 dan IPG 2 tertinggi dari 15 Kabupaten / Kota. Dengan kata lain, perempuan Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

Sebagai salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung meningkatkan IDG dan IPG dengan melakukan program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Pelatihan yang diberikan kepada Perempuan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat dikembangkan dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Pemberdayaan perempuan tersebut mampu meningkatkan pencapaian IDG dan IPG, Kondisi ini memberikan gambaran perempuan di Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 mempunyai target sebesar 93,88 dan terealisasi sebesar 93,93 dengan capaian kinerja kategori Sangat Baik yaitu sebesar 100,05%.

Tingkat Capaian Kota Layak Anak diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. kepada Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagai Penghargaan bagi Pemerintah yang telah mewujudkan komitmennya terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta lingkungan yang ramah anak di Daerahnya.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tujuan KLA Secara Umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara Khusus: untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Secara Internasional, dasar Kota Layak Anak adalah :

- Deklarasi Hak Asasi Manusia
- Konvensi Hak-hak Anak
- World Fit For Children

Sedangkan secara Nasional, Landasan Hukum KLA adalah :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
- UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2022
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional

Indikator KLA Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu :

- 1) Hak Sipil dan Kebebasan;
- 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 5) Perlindungan khusus.

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan melalui beberapa tahapan :

- 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung;
- 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian;
- 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada tahun 2022 Tingkat Capaian Kota Layak Anak ditargetkan mendapatkan predikat Madya (nilai :642,5) dan terealisasi dengan mendapatkan predikat Nindya (hasil penilaian 717), oleh karena itu capaian kinerjanya termasuk kategori Sangat Baik yaitu sebesar 111,6%.

Pemuda Berprestasi merupakan pemuda yang mampu menuangkan ide-idenya untuk sebuah perubahan. Untuk mewujudkannya yaitu dengan membuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 9,61% dan terealisasi 6,30% sehingga capaian kinerjanya 65,56%. Berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada organisasi pemuda yang aktif dengan target capaian sebanyak 3 (tiga) orang dan tercapai 100%.

Berdasarkan Tingkat keberhasilan pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada kegiatan seleksi dan pembinaan paskibra tingkat kecamatan dan Kota berjumlah 80 orang yang lulus seleksi sebanyak 37 orang.

Selanjutnya berdasarkan jumlah atlet muda yang berprestasi dalam ajang PORPROV tahun 2022 berjumlah 606 orang dan jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) sebanyak 178 dan anggota yang aktif adalah berjumlah 5986 orang. Adapun target dan realisasi pada misi II dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.10
CAPAIAN KINERJA SASARAN MISI II TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	10,96	100	SANGAT BAIK	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	14,71	91,14	BAIK	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Indeks Pembangunan Gender	93,88	93,93*	100,05	SANGAT BAIK	BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan & PPA
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	111,6	SANGAT BAIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PPA

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	6,30	65,56	CUKUP	Dispora

Indikator tingkat keberhasilan untuk Generasi Muda atau pemuda berprestasi adalah pemuda yang memiliki prestasi dibagi dengan pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, memiliki kontribusi bagi Pemerintah daerah atau Negara dan pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial serta pemuda yang aktif dalam pengembangan potensi diri.

TABEL 3.11
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA MISI II TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,945	10,97	99,77	10,96	10,96	100
		Angka Harapan Lama Sekolah	15,37	14,70	95,64	16,14	14,71	91,14
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Indeks Pembangunan Gender	93,87	93,93	100,05	93,88	93,93*	100,05
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	100	Madya	Nindya	111,6
		Persentase Pemuda Berprestasi	2,92	2,92	100	9,61	6,30	65,56

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 2 sasaran dan 5 indikator kinerja, maka 4 indikator berhasil dengan baik dan 1 indikator yang belum tercapai adalah pemuda berprestasi. Untuk itu perlunya komitmen pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Pemuda Olah Raga yang secara langsung melakukan pembinaan kepada Pemuda agar melakukan pembinaan untuk mendorong Pemuda bisa berkarya dan berprestasi serta memiliki jiwa sportivitas, mandiri dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Selanjutnya dapat dilihat capaian tahun 2022 jika dibandingkan target 2026.

TABEL 3.12
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI II TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	11	99,63
		Angka Harapan Lama Sekolah	14,71	18,68	78,74
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Indeks Pembangunan Gender	93,93*	93,96	99,96
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (717)	Nindya (717)	100
		Persentase Pemuda Berprestasi	6,30	9,88	63,76

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah hampir mencapai target, IPG telah mencapai target, Capaian Kota Layak Anak sudah melampaui target RPJMD, sedangkan angka harapan lama sekolah masih tercapai 78,74, namun untuk pemuda berprestasi masih tercapai 63,76% artinya masih harus banyak effort untuk menciptakan pemuda berprestasi di Kota Bandar Lampung.

TABEL 3.13
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI II TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	10,96	100	Tingginya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan	Meningkatkan wawasan pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	14,71	91,14	Masih adanya anggapan tidak perlu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi	Sosialisasi pentingnya pendidikan bagi masa depan
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Indeks Pembangunan Gender	93,88	93,93*	100,05	Aspek pendukung dari segi pendidikan sudah memadai	Mempertahankan dan meningkatkan keadaan yang sudah ada
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	111,6	Tersedianya lembaga konsultasi, lembaga pengasuhan alternatif dan infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak	Mempertahankan dan meningkatkan keadaan yang sudah ada

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	6,30	65,56	Pembinaan masih kurang	Melakukan pembinaan yang berkesinambungan dan anggaran yang memadai

MISI III

MENINGKATKAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR DALAM SKALA MANTAP UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Sasaran ini didukung oleh Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum.

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap adalah pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat dapat meningkatkan persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Target kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 85,81% dan dapat terealisasi dengan sangat baik yaitu sebesar 89,95%, melebihi target yang telah ditentukan sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,82%.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi pada kegiatan ini adalah masih terjadinya kelebihan kapasitas penggunaan jalan, baik berat maupun jumlahnya. Hal ini harus selalu dikoordinasikan dengan pihak yang terkait sehingga kondisi jalan dapat terjaga dan tidak cepat rusak. Keberhasilan misi ini tidak terlepas dari komitmen Pemda untuk menyediakan prasarana jalan yang baik, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

SASARAN 2

MENINGKATNYA PENGENDALIAN BANJIR

Sasaran ini didukung oleh Persentase Daerah Rawan Banjir. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum.

Persentase Daerah Rawan Banjir merupakan perbandingan antara pengendalian titik rawan banjir dengan banyaknya daerah yang termasuk rawan banjir dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pembangunan drainase yang dilaksanakan pada tahun 2022 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. Luas daerah rawan banjir di Kota Bandar Lampung seluas 40,48 Ha, pada tahun 2022 ini ditargetkan 55% dilaksanakan oleh Dinas PU untuk mengurangi wilayah banjir. Namun ternyata penanganan wilayah banjir pada tahun 2022 mengurangi banjir seluas 34,33 ha atau 84% dari wilayah banjir di Kota Bandar Lampung, sehingga capaian kinerjanya sebesar 152% kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan terlaksananya secara maksimal program Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan terjadinya banjir seperti dengan melakukan kegiatan pembangunan drainase dan gerebek sungai dengan cara pengerukan sungai yang dangkal, membersihkan sungai yang ada penumpukan sampah dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.

Permasalahan yang masih dihadapi pada kegiatan ini masih adanya penumpukan sampah rumah tangga yang mengakibatkan penyumbatan aliran air drainase yang menyebabkan peluapan air pada saat hujan. Hal ini harus selalu dikoordinasikan dengan pihak yang terkait sehingga kondisi drainase dapat terjaga dan aliran air tidak tersumbat.

SASARAN 3

MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERMUKIMAN LAYAK

Sasaran ini didukung oleh RTLH Yang Tertangani Pertahun dan Persentase Kawasan Kumuh. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum.

RTLH Yang Tertangani Pertahun merupakan penanganan rumah yang dianggap tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Pada Tahun 2022 target penanganan RTLH tidak dapat tercapai dikarenakan program tidak dilaksanakan dengan adanya hambatan waktu implementasi programnya sangat pendek sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatannya membutuhkan tahapan yang cukup panjang, seperti sosialisasi pada masyarakat dengan memberikan pemahaman manfaat dari kegiatan perbaikan bagi rumah yang tidak layak huni dan perlu kesadaran masyarakat untuk berperan dalam program ini. Pada tahun 2022 kegiatan RTLH ini tidak dilaksanakan karena terbatasnya waktu sosialisasi.

Persentase Kawasan Kumuh merupakan perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pengurangan luasan kumuh sebesar 37,47 Ha sehingga luasan kumuh di Kota Bandar Lampung menjadi 259,78 Ha.

Capaian kinerja dalam merealisasikan persentase kawasan kumuh adalah sebesar 100% dengan perhitungan dari target yang ditetapkan sebesar 0,89% terealisasi sebesar 0,89%.

SASARAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS TATA RUANG

Sasaran ini didukung oleh Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW merupakan perbandingan pembangunan dengan memanfaatkan kesesuaian ruang di wilayah Kota Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keserasian

pembangunan dalam wilayah Kota dengan wilayah sekitarnya sehingga terwujudnya tata ruang wilayah Kota yang berkualitas.

Selain memberikan layanan perizinan yang sesuai dengan fungsi ruang, maka peningkatan pengawasan juga harus dilakukan agar izin yang dikeluarkan tidak menyimpang dan penataan kota sesuai dengan peruntukan dan estetika kota terpenuhi.

Target yang telah ditentukan dalam pencapaian indikator kinerja utama Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW adalah sebesar 54,65% dan dapat terealisasi sangat baik dengan persentase sebesar 54,65% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Pemanfaatan ruang juga tidak terlepas dari peran DMPTSP dalam memberikan perizinan yang sesuai dengan RTRW dan RDTRK yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi komitmen Pemda agar kesinambungan lingkungan tetap terjaga di Kota Bandar Lampung.

Kinerja dapat tercapai dengan baik dikarenakan penggunaan lahan di wilayah Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peta polar uang sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

SASARAN 5

MENURUNNYA MASALAH KEMACETAN

Sasaran ini didukung oleh Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Perhubungan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Titik Kemacetan Yang Terselesaikan merupakan penyelesaian masalah kemacetan di beberapa titik wilayah Kota Bandar Lampung yang terjadi pada jam sibuk pagi-sore serta terjadi di lingkungan pasar tradisional. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah mengaktifkan petugas Pengamanan dan Pengaturan (PAMTUR Lalu Lintas) pagi dan sore hari di lokasi rawan kemacetan lalu lintas sehingga terciptanya lalu lintas yang lancar. Dengan adanya kegiatan PAMTUR Lalu Lintas tersebut sedikit banyak mengurangi titik kemacetan yang sering terjadi di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung.

Persentase titik kemacetan yang terselesaikan adalah sebesar 40% dari target yang ditentukan sebesar 50% sehingga capaian kinerja pada indikator kinerja utama ini adalah sebesar 80%.

Dalam mengatasi kemacetan Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Sat Pol PP menempatkan petugas di seluruh titik kemacetan, U turn, persimpangan jalan, Lampu merah. Hal ini dilakukan pagi dan sore khususnya jam anak sekolah dan jam kantor pulang atau pergi serta insidental jika ada event-event skala lokal dan nasional agar kelancaran lalu lintas dapat tercipta.

TABEL 3.14
CAPAIAN KINERJA SASARAN MISI III TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	85,81	89,95	104,82	SANGAT BAIK	Dinas PU
2	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Persentase Daerah Rawan banjir	55,0	84	152	SANGAT BAIK	Dinas PU
3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	RTLH Yang Tertangani Tahun	23,63	0	0	SANGAT KURANG	Dinas Perkim
		Persentase kawasan kumuh	0,890	0,89	100	SANGAT BAIK	Dinas Perkim
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	54,65	100	SANGAT BAIK	Dinas Perkim
5	Menurunnya Masalah Kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	50,00	40	80	BAIK	Dinas Perhubungan

Dari data di atas, proporsi panjang jalan di Kota Bandar Lampung telah melampaui target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan sangat baik, begitupun jumlah daerah rawan banjir menurun hingga 15,19%, kawasan kumuh juga berkurang 0,89%, pemanfaat ruang yang sesuai dengan RTRW berjalan dengan sangat baik. Sedangkan tingkat kemacetan masih ada tersisa di beberapa titik, khususnya wilayah perdagangan dan RTLH yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

TABEL 3.15
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA MISI III TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	85,31	85,60	111,29	85,81	89,95	104,82
2	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Persentase Daerah Rawan banjir	55,0	54,08	98,33	55,0	84	152
3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	RTLH Yang Tertangani Pertahun dan	32,68	31,20	95,47	23,63	0	0
		Persentase kawasan kumuh	1,17	1,31	88,03	0,890	0,89	100
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,14	54,26	100,2	54,65	54,65	100
5	Menurunnya Masalah Kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	40	40	100	50,00	40	80

TABEL 3.16
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI III TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	89,95	87,31	103
2	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Persentase Daerah Rawan banjir	15,19	35,00	43,4
3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	RTLH Yang Tertangani Pertahun dan	0	18,97	0
		Persentase kawasan kumuh	0,89	0,170	523,5
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	56,20	97,24
5	Menurunnya Masalah Kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	40	80	50

Tabel di atas menunjukkan capaian yang pada misi III, sudah cukup baik, kecuali RTLHS dan persentase titik kemacetan yang perlu di benahi.

TABEL 3.17

ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI III TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	85,81	89,95	104,82	Terealisasinya seluruh kegiatan pembangunan/ peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	
2	Meningkatnya Pengendalian Banjir	Persentase Daerah Rawan banjir	55,0	15,19	329,16	Terlaksananya program pencegahan banjir seperti pembangunan drainase, gerbek sungai dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan	
3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	RTLH Yang Tertangani Pertama	23,63	0	0	Tidak terlaksananya program yang disebabkan adanya hambatan waktu, belum adanya sosialisasi yang intens ke masy sasaran,	Penyesuaian waktu dalam pelaksanaan program sehingga antara tahapan pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang diberikan ada kesesuaian
		Persentase kawasan kumuh	0,89	0,89	100	Pembangunan fisik dan lingkungan, peningkatan akses sanitasi dan air bersih	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	54,65	100	Pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
5	Menurunnya Masalah Kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	50,00	40	80	Penanganan titik kemacetan yang intens dilakukan pemerintah Kota B.Lampung dengan cara pembangunan fly over, perbaikan jalan-jalan alternatif dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan bersama – sama dengan pihak keposlisan lalu lintas	

MISI IV

MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SASARAN 1

MENINGKATNYA SEKTOR UNGGULAN DAERAH

Sasaran ini didukung oleh Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB, Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB, Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB, Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya, Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM.

Sebagai wilayah perkotaan, maka perekonomian di Kota Bandar Lampung didukung oleh Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB, pada Tahun 2022 dari target 21,20%, terealisasi sebesar 21,09%, dengan persentase pencapaian 99,50%, dengan pencapaian realisasi kategori Baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 99,85%, maka terjadi sedikit penurunan capaian kinerja dikarenakan target 2022 lebih besar dari target 2021, namun untuk kontribusi ublicd pengolahan terhadap PDRB tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu mengalami peningkatan sebesar 5,32% dari 12973,36 (miliar rupiah) menjadi 13505,49 (miliar rupiah).

Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB pada Tahun 2022 dari target 21,20%, terealisasi sebesar 21,09%, dengan persentase pencapaian 99,50%, dengan pencapaian realisasi kategori Baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 99,85% dengan, maka terjadi sedikit penurunan capaian kinerja dikarenakan target 2022 lebih besar dari target 2021, namun untuk kontribusi 95ublic95d pengolahan terhadap PDRB tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu mengalami peningkatan sebesar 5,32% dari 12973,36 (miliar rupiah) menjadi 13505,49 (miliar rupiah).

Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB pada tahun 2022 menurut BPS terealisasi sebesar 14,94% dari target sebesar 14,05%, maka capaian kerjanya adalah sebesar 106,3%. Kontribusi perdagangan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2022 adalah sebesar 14,9% dari total PDRB Kota Bandar Lampung yang sebesar 67940,87 (miliar rupiah), adapun kontribusi perdagangan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung sebesar 10.149,15 (miliar rupiah).

Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB terdiri dari :

1. Jasa keuangan dan asuransi sebesar 3.266,33 (miliar rupiah) atau 4,8% dari PDRB.
2. Jasa perusahaan sebesar 253,05 (miliar rupiah) atau 0,37% dari PDRB.
3. Jasa pendidikan sebesar 2.319,01 (miliar rupiah) atau 3,41% dari PDRB;
4. Jasa kesehatan dan kegiatan publik sebesar 1.344,29 (miliar rupiah) atau 1,98% dari PDRB;
5. Jasa Lainnya sebesar 1123,98 (miliar rupiah) atau 1,65% dari PDRB
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1.764,42 (miliar rupiah) 2,60% dari PDRB.

Dilihat dari uraian diatas maka total kontribusi Jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 35.123,03 (miliar rupiah) atau 51,70% dari PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2022 yang sebesar 67940,87 (miliar rupiah). Persentase capaian tahun 2022 kategori baik yaitu 96,61% dari target 15,34% terealisasi sebesar 14,82%.

Persentase UMKM Yang Meningkatkan Labanya pada tahun 2022 terealisasi sebesar 30,54% dari target yang telah ditentukan sebesar 31,50% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 96,95%.

Pada tahun 2022 jumlah UMKM yang meningkat labanya sebanyak 580 UMKM sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 430 UMKM sehingga ada kenaikan sebesar 150 unit sampai dengan tahun 2022.

Pada tahun 2022 persentase realisasi UMKM yang meningkat labanya mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 34,90% dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 22,64% menjadi 30,54% pada tahun 2022. Dan selanjutnya dibandingkan dengan target Renstra yang sebesar 44,70% maka jumlah kemajuan UMKM yang meningkat labanya adalah sebesar 68,32%. Tingkat kemajuan yang ditunjukkan oleh persentase UMKM yang meningkat labanya pada tahun ini sudah mendekati target akhir Renstra dan sekitar 14,16% lagi yang harus dicapai sehingga dapat memenuhi target Renstra. Dengan periode Renstra yang masih 4 tahun lagi memunculkan angka optimis untuk pemenuhan target akhir Renstra. Perkembangan jumlah UMKM yang meningkat labanya selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa besar capaian tersebut dipengaruhi oleh peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung perkembangan UKM di Kota Bandar Lampung berupa penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui Bank Waway untuk Penyaluran Kredit Ekor (ekonomi Kerakyatan), Melalui KUR dan kemitraan dengan BUMN. Sehingga peran Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terhadap para pelaku UMKM dapat memberikan kontribusi baik dari keterampilan SDM, SDA, dan modal usaha.

Persentase Koperasi Sehat Dan Cukup Sehat pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 18,83% dari target 18,11, sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,97%. Dari total jumlah koperasi yang ada sebanyak 393 unit dan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 74 unit koperasi. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah koperasi yang ada sebanyak 664 unit koperasi dengan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 55 unit koperasi, sehingga terdapat kenaikan 8 unit koperasi sehat dan cukup sehat dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 104,81% dari realisasi tahun 2021 sebesar 21,06%. Jika dibandingkan terhadap akhir Renstra (44,70%) capaian sebesar 50,65%.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

“(Jumlah koperasi sehat / Seluruh jumlah koperasi) x 100%”

Adapun parameter yang digunakan untuk menghitung persentase koperasi sehat dan cukup sehat adalah koperasi tersebut menjalankan usahanya dengan baik, yaitu dari sisi kelembagaan maupun manajerial sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yaitu dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang selanjutnya digunakan dalam proses perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

SASARAN 2

MENINGKATNYA INVESTASI DAN MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA

Sasaran ini didukung oleh Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN), Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas Ketenagakerjaan.

Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN) pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 43,94% dari target 15,99% dengan capaian kinerja sebesar 274,80%. Pada Tahun 2022 PMDN Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan sebesar 43,94% dibandingkan dengan tahun 2021, jika pada tahun 2021 PMDN terealisasi sebesar Rp. 3.480.180.424.677,00, maka pada tahun 2022 mencapai Rp.5.009.521.724.677,00.

Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA) di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 mengalami peningkatan 24,77% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 174.944.100,00 (US Dollar), jika pada tahun 2021 PMA sebesar 706.294.714,00 (US Dollar) maka pada tahun 2022 menjadi 881.238.814,00 (US Dollar).

Target PMA pada tahun 2022 adalah sebesar 5,05% dan dapat terealisasi sebesar 24,77% dengan begitu capaian kinerjanya sangat baik, sebesar 490,50% dengan kategori sangat baik

Perhitungan Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA) dapat dilihat seperti di bawah ini:

$$\frac{(\text{Realisasi PMA 2022} - \text{Realisasi PMA 2021}) \times 100 \%}{\text{Realisasi PMA 2021}}$$

$$\frac{\text{US\$ 881.238.814,00} - \text{US\$ 706.294.714,00} \times 100\%}{\text{US\$ 706.294.714,00}} = 24,77\%$$

TABEL 3.18

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
			(%)	(%)	(%)
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan masy	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,55	12	24,77

Dari tabel di atas, dapat dilihat perbandingan Capaian Kinerja PMA pada tahun 2022 dengan Capaian Kinerja PMA Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,77%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran

$$\text{Rumusan TPT} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung sebesar 7,91% dari target yang telah ditentukan sebesar 8,51% sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 92,95%.

SASARAN 3

MENURUNNYA KEMISKINAN

Sasaran ini didukung oleh Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita Penduduk. Perangkat Daerah pengampu indikator ini yaitu Dinas Sosial.

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Berdasarkan data BPS 2022 persentase jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung adalah sebesar 8,21%. Rumus perhitungan persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah : $100\% - \text{persentase jumlah penduduk miskin}$

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan : $100\% - 8,21\% = 91,79\%$

Target persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 adalah sebesar 91,43% dengan realisasi sebesar 91,79% maka capaian kerjanya sangat baik yaitu sebesar 100,40%. Hal ini berarti jumlah penduduk miskin semakin berkurang pada tahun 2022. Hal ini didukung oleh data BPS Tahun 2023, dimana jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung turun menjadi 90.510 jiwa pada tahun 2022 atau turun dibandingkan tahun 2021 sejumlah 98.760 jiwa.

Pendapatan Per Kapita Penduduk adalah jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu Negara atau wilayah geografis. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.

Rumus perhitungan pendapatan perkapita penduduk Daerah :

$$\frac{\text{PDRB harga konstan}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Berdasarkan data BPS 2022 bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di kota Bandar Lampung adalah sebesar 41800,07 (miliar rupiah) dan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 1.209.763

Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2021:

$$\frac{41800,07 \text{ (miliar rupiah)}}{1.209.763}$$

= RP. 34.552.280

Namun, jika dilihat hasil perhitungan pendapatan perkapita penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2022 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 56.152 (dalam ribuan rupiah) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.54 – 56 juta maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

SASARAN 4

MENINGKATNYA PENANGANAN PMKS

Sasaran ini didukung oleh Persentase PMKS yang tertangani. Perangkat Daerah pengampu indikator ini yaitu Dinas Sosial.

Persentase PMKS Yang Tertangani merupakan penanganan/bantuan jumlah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan permasalahan PMKS dapat tertangani sebesar 77,00% dan dalam

pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar 3,40% atau capaian kerjanya sebesar 40,77%. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada sasaran meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.

TABEL 3.19**CAPAIAN KINERJA SASARAN MISI IV TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	21,09	99,50	BAIK	BPS
		Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	14,94	106,33	SANGAT BAIK	BPS
		Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	14,82	96,61	BAIK	BPS
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	30,54	96,95	BAIK	Dinas Koperasi & UMKM
		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	18,83	103,97	SANGAT BAIK	Dinas Koperasi & UMKM
2	Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN),	15,99	43,94	274,80	SANGAT BAIK	Dinas PM & PTSP
		Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	24,77	490,50	SANGAT BAIK	Dinas PM & PTSP
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	7,91	107,60	SANGAT BAIK	BPS & Disnaker
3	Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	91,43	91,79	100,40	SANGAT BAIK	BPS
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	54.152.000	100	SANGAT BAIK	BPS
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	77,00	31,40	40,77	SANGAT KURANG	Dinas Sosial

TABEL 3.20
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA MISI IV TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,10	20,97%	99,85	21,20	21,09	99,50
		Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	13,65	13,80	101,1	14,05	14,94	106,33
		Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum terhadap PDRB	15,33	15,16	98,89	15,34	14,82	96,61
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	26,30	22,64	86,08	31,50	30,54	96,95
		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	16,96	16,09	94,87	18,11	18,83	103,97
2	Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN),	15,49	57,45	370	15,99	43,94	274,80
		Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	4,55	12	263	5,05	24,77	490,50
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,78	8,85%	99,77	8,51	7,91	107,60
3	Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	91,29	90,89%	99,5	91,43	91,79	100,40
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	51-53	51,91	100	54 – 56	54.152.000	100
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	74,00	63,06	85,21	77,00	31,40	40,77

TABEL 3.21
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI IV TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,09	21,45	98,32
		Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,94	14,45	103,40
		Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	14,82	15,45	95,92
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	30,54	44,70	68,32
		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,83	21,53	87,45
2	Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN),	43,94	17,49	251,22
		Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	24,77	6,55	378,16
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,91	7,12	90
3	Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	91,79	91,85	99,93
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	54.152.000	65,00 -67,00	86,15
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	40,77	88,00	51

TABEL 3.22
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI IV TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	21,09	99,50	Ketersediaan bahan baku dan bahan mentah, faktor ekonomi dan investasi	
		Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	14,94	106,33	Promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, stabilitas dan jumlah harga bahan pokok serta inflasi pangan yang berkejang	
		Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	14,82	96,61	Penyumbang Kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu dari sektor Jasa Kesehatan dan Asuransi	
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	30,54	96,95	Penguatan modal usaha dengan bunga 0% dan penyaluran dana bergulir serta KUR, Bazar produk UMKM.	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	18,83	103,97	Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Koperasi sehingga manajemen koperasi menjadi lebih baik	
2	Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN),	15,99	43,94	274,80	Kemudahan syarat berinvestasi di Kota Bandar Lampung menyebabkan pertumbuhan nilai PMDN meningkat	
		Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	24,77	490,50	Tingkat keamanan di wilayah Kota Bandar Lampung yang sangat baik dan kemudahan berinvestasi di Kota Bandar Lampung menyebabkan pertumbuhan nilai PMA meningkat	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	7,91	107,60	Faktor menurunnya tingkat pengangguran terbuka disebabkan telah dilakukan pelatihan terhadap penduduk usia produktif untuk menambah keahlian mereka sehingga siap kerja, lapangan pekerjaan yang tersedia semakin banyak	
3	Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	91,43	91,79	100,40	Jumlah Penduduk yang berada diatas garis kemiskinan semakin bertambah disebabkan jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan tetap (bekerja) semakin bertambah	
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	34,55	64	Tercapainya pendapatan perkapita seiring dengan membaiknya perumbuhan ekonomi daerah	
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	77,00	31,40	40,77	Penanganan PMKS belum maksimal dikarenakan anggaran belum maksimal dapat direalisasikan	Agar anggaran program penanganan PMKS menjadi prioritas

MISI V

MENGEMBANGKAN MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN MENGEMBANGKAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT YANG RELIGIUS

SASARAN 1

MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

Sasaran ini didukung oleh Angka Kriminalitas Yang Tertangani dan Persentase Konflik Sosial, Keagamaan Dan Ras Yang Tertangani. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka Kriminalitas Yang Tertangani pada tahun 2022 dapat terealisasikan sebanyak 1.632 kejadian dari target yang ditetapkan sebanyak 1.531 kejadian sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,60%. Peningkatan angka kriminalitas diakibatkan meningkatnya banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan, namun dengan adanya program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal serta Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung maka angka kriminalitas dapat ditekan dan ditangani dengan baik bersama-sama dengan instansi penegak hukum yang terkait .

Persentase Konflik Sosial, Keagamaan Dan Ras Yang Tertangani oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 adalah sebesar 100% dari jumlah target yang ditetapkan sebesar 78,50% seluruhnya dapat tertangani dengan sangat baik sehingga capaian kinerjanya sebesar 127,39%.

SASARAN 2

MENINGKATNYA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA DAERAH

Sasaran ini didukung oleh Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata.

Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2022 target capaiannya adalah 40% dan terealisasi sebesar 40% sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100%.

TABEL 3.23
CAPAIAN KINERJA SASARAN MISI V TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	1.531	1.632	106,60	SANGAT BAIK	Kesbangpol
		Persentase Konflik Sosial, Keagamaan Dan Ras Yang Tertangani	78,50	100	127,39	SANGAT BAIK	Kesbangpol
2	Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40	40	100	SANGAT BAIK	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

TABEL 3.24
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA MISI V TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	1.411	1.630	115,52	1.531	1.632	106,60
		Persentase Konflik Sosial, Keagamaan Dan Ras Yang Tertangani	78,00	78,00	100	78,50	100	127,39
2	Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	25,00	25,00	100	40	40	100

TABEL 3.25
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI V TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	1.632	1.724	94,66
		Persentase Konflik Sosial, Keagamaan Dan Ras Yang Tertangani	100	80,00	125
2	Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40	85,00	47

TABEL 3.26
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI V TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	1.531	1.632	106,60	Kasus kriminalitas dapat ditangani dengan sangat baik dengan cara menumbuhkan kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan	
		Persentase Konflik Sosial, Keagamaan Dan Ras Yang Tertangani	78,50	100	127,39	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan, terciptanya forum keberagaman suku, agama di Kota Bandar Lampung	
2	Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40	40	100	Setiap tahun dilakukan perawatan dan pelestarian seluruh benda bersejarah baik itu berupa situs dan cagar budaya	

MISI VI

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, BERORIENTASI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENDUKUNG INVESTASI

SASARAN 1

MENINGKATNYA PENERAPAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Sasaran ini didukung oleh Indeks RB (Reformasi Birokrasi). Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini adalah Sekretariat Daerah.

INDEKS RB (REFORMASI BIROKRASI) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB mendapatkan nilai CC dengan skor (58,77). Apabila dibandingkan dengan target Nilai Indeks RB tahun 2022 sebesar 61,00 maka capaian kinerja yang diperoleh termasuk kategori Baik adalah sebesar 96,34%.

Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional dan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung serta telah menjalankan rekomendasi hasil penilaian evaluasi pelaksanaan RB tahun sebelumnya.

Adapun delapan area perubahan pada Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penataan dan penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tata Laksana;
- e. Penataan SDM;
- f. Penguatan Pengawasan;
- g. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi baik melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional serta sistem Kerja ASN telah dilakukan pada Tahun 2022. Selain itu pelayanan publik, tata laksana dan pengawasan telah dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengisian jabatan Tinggi Pratama juga sudah melalui Seleksi Terbuka (Selter), selanjutnya pengawasan baik melalui SPI ataupun pembinaan yang dilakukan APIP terus ditingkatkan kualitasnya.

Khusus pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2022 telah berhasil meraih predikat A (terbaik) oleh kemenpan RB. Saat ini juga Pemda Kota Bandar Lampung sedang membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis Digital agar pelayanan publik semakin optimal dan tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat.

TABEL 3.27
CAPAIAN KINERJA SASARAN MISI VI TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	58,77 (CC)	96,34	BAIK	Menpan RB & Bagian Organisasi

TABEL 3.28
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA MISI VI TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	60,05	58,81 (CC)	97,93	61,00 (CC)	58,77 (CC)	96,34

TABEL 3.29

KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI VI TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	58,77 (CC)	66,05 (BB)	88,98

TABEL 3.30

ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI VI TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	58,77 (CC)	96,34	Implementasi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan melalui berbagai macam kebijakan telah diterapkan untuk mendukung implementasi reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan perubahan	Melakukan pengembangan SPBE untuk memudahkan pekerjaan ASN sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik

MISI VII

MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SKALA KOTA YANG SEHAT, SEJUK, BERSIH DAN NYAMAN BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN EKOSISTEM LINGKUNGAN PERKOTAAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran ini didukung oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota mempunyai rumus :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL).$$

Dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdapat beberapa indikator kinerja seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kegiatan yang mendukung untuk mencapai target Indeks Kualitas Air dengan target 60,64 di tahun 2022 yaitu berupa pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Pencemaran Air meliputi :

Status Mutu Air Sungai	Jumlah Sungai	Persen	Koefisien	Koefisien
Memenuhi	11	68,75	70	48,13
Ringan	5	31,25	50	15,63
Sedang	0	0	30	0
Berat	0	0	10	0
Jumlah	16	100		63,75
Nilai Indeks Pencemaran Air				0

Target output Indeks Kualitas Air 61,43 dan terealisasi sebesar 58,86 di tahun 2022. Sehingga Indeks Kualitas Air melebihi target di tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 95,81%.

Adapun Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air antara lain sungai-sungai di Kota Bandar Lampung debit airnya kecil dan dalam kondisi tercemar, belum ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik terpadu.

SASARAN 2

MENINGKATNYA PENGENDALIAN RESIKO BENCANA

Sasaran ini didukung oleh Indeks Resiko Bencana. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Indeks Resiko Bencana memiliki beberapa komponen penilaian salah satunya kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Indeks Resiko bencana tahun 2022 belum di *release* oleh BNPB Pusat, maka sementara indeks yang disampaikan dalam laporan ini berdasarkan indeks resiko bencana Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 yaitu sebesar 165,56, namun selama ini penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah baik. Untuk itu, pemerintah Kota meyakini bahwa Indeks Resiko Bencana Tahun 2022 di Kota

Bandar Lampung akan menurun karena penanganan bencana telah dilakukan dengan cara mitigasi, pencegahan dan penyelamatan terhadap resiko bencana. Penanganan bencana dilakukan dalam upaya memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

TABEL 3.31
CAPAIAN KINERJA SASARAN MISI VII TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh).	61,43	58,86	95,81	BAIK	Dinas Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	165,56*	80,93	BAIK	BPBD

TABEL 3.32
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA MISI VII TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	60,64	63,75	105,1	61,43	58,86	95,81
2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	145,932	165,56	80,93	139,048 (Tinggi)	165,56*	80,93*

TABEL 3.33
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI VII TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	58,86	62,89	93,60
2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	165,56* (Tinggi)	118,396 (Sedang)	47

TABEL 3.34**ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI VII TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	61,43	58,86	95,81	Indikator IKLH adalah Indeks Kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan yang pada tahun 2022 dari ketiga indikator tersebut terdapat dua indikator yang tidak mencapai target sehingga mempengaruhi nilai IKLH Kota B.Lampung	Dilakukan pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara berkala
2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	165,56*	80,93	Melakukan upaya mitigasi bencana sehingga mengurangi resiko bencana	BPBD memberikan peringatan dini kepada seluruh kecamatan jika ada perubahan cuaca atau bahaya

3.3. REALISASI ANGGARAN

Kinerja yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung selama tahun 2022 didukung oleh pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2022 yang menunjang pencapaian sasaran telah ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Adapun Anggaran Realisasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.35

REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	U R A I A N	Reff	APBD-P 2022 (Unaudited)	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	520,195,262,269.00	98,946,403,154.86	95.92%	416,921,523,707.00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	47,984,673,205.48	0,313,700,256.75	42.33%	22,099,157,927.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	33,776,185,222.10	4,566,440,743.36	43.13%	22,972,960,178.78
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.1.1.1.4.	333,213,857,936.42	12,140,786,461.90	33.65%	102,295,971,935.13
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		935,169,978,633.00	45,967,330,616.87	69.07%	564,289,613,747.91
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1.1.				
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1.a	69,108,767,371.00	9,889,760,987.00	115.60%	79,749,851,708.00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.1.b	1,002,213,665,000.00	994,485,941,727.00	99.23%	1,002,082,183,350.00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.1.c	43,320,727,000.00	1,810,272,846.00	96.51%	59,166,237,809.00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik Penugasan	5.1.1.2.1.1.d	-	-	-	-
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.1.e	312,008,265,000.00	79,398,780,386.00	89.55%	179,583,272,655.00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 14)		1,426,651,424,371.00	1,395,584,755,946.00	97.82%	1,320,581,545,522.00
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.1.2.				
17	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.1.2.a	8,791,675,000.00	8,791,675,000.00	100.00%	34,272,707,000.00
18	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	5.1.1.2.1.2.b	-	-	-	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s/d 18)		8,791,675,000.00	8,791,675,000.00	100.00%	34,272,707,000.00
20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.2.				
21	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1.	133,778,321,275.00	31,595,281,260.00	98.37%	108,035,619,732.00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (21)		133,778,321,275.00	131,595,281,260.00	98.37%	108,035,619,732.00
23	Total Pendapatan Transfer (15+19+22)		1,569,221,420,646.00	1,535,971,712,206.00	97.88%	1,462,889,872,254.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.				
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	4,500,000,000.00	-	-	3,450,586,150.00
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2.	-	-	-	97,119,500,000.00
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (28 s/d 29)		4,500,000,000.00	-	-	100,570,086,150.00
28	JUMLAH PENDAPATAN (7+23+27)		2,508,891,399,279.00	2,181,939,042,822.87	86.97%	2,127,749,572,151.91

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

29	BELANJA	5.1.2.				
30	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	981,393,677,730.34	63,375,394,263.07	87.97%	845,890,462,056.11
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	1,287,899,991,515.04	70,981,734,775.78	67.63%	694,849,885,185.10
33	Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	11,000,000,000.00	0,265,113,770.00	93.32%	15,119,791,378.00
34	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4.	2,458,578,427.00	2,458,574,500.00	99.99%	-
35	Belanja Hibah	5.1.2.1.5.	100,496,377,179.00	2,597,051,357.00	82.19%	27,731,375,400.00
36	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6.	5,680,000,000.00	-	-	9,495,828,600.00
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)		2,388,928,624,851.38	1,829,677,868,665.85	76.59%	1,593,087,342,619.21
38	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
39	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.1.2.2.1.	-	-	-	-
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	65,689,536,538.00	9,214,431,118.00	59.70%	66,056,651,444.00
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	199,527,221,455.16	52,562,250,068.15	76.46%	169,003,826,345.00
42	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	305,010,976,000.00	12,429,244,155.00	69.65%	162,701,972,995.00
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	23,953,797,496.00	0,545,050,932.00	85.77%	3,021,435,374.00
44	Jumlah Belanja Modal (39 s/d 43)		594,181,531,489.16	424,750,976,273.15	71.49%	400,783,886,158.00
45	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3.				
46	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1.	46,148,000,000.00	9,190,717,061.00	41.59%	24,519,891,197.00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga (46)		46,148,000,000.00	19,190,717,061.00	41.59%	24,519,891,197.00
48	JUMLAH BELANJA (37+44+47)		3,029,258,156,340.54	2,273,619,562,000.00	75.06%	2,018,391,119,974.21
49	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
50	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	-	-	-	-
51	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	-	-	-	-
52	Jumlah Belanja Transfer (50 s/d 51)		-	-	-	-
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (48+52)		3,029,258,156,340.54	2,273,619,562,000.00	75.06%	2,018,391,119,974.21
54	SURPLUS / (DEFISIT) (28-53)		(520,366,757,061.54)	(91,680,519,177.13)	17.62%	109,358,452,177.70
55	PEMBIAYAAN	5.1.3.				
56	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.				
57	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu	5.1.3.1.1.	15,600,869,420.54	5,600,869,420.54	100.00%	11,810,432,867.84
58	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2.	570,035,887,641.00	56,766,963,670.15	27.50%	9,000,000,000.00
59	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (57 s/d 58)		585,636,757,061.54	172,367,833,090.69	29.43%	20,810,432,867.84
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.				
61	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1.	12,000,000,000.00	4,000,000,000.00	33.33%	2,277,000,000.00
62	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.1.3.2.2.1.	53,270,000,000.00	3,267,578,125.00	99.99%	103,291,015,625.00
63	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.3.2.2.2.	-	-	-	9,000,000,000.00
64	Pembayaran Pokok Utang	5.1.3.2.3.	-	-	-	-
65	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (61 s/d 64)		65,270,000,000.00	57,267,578,125.00	87.74%	114,568,015,625.00
66	PEMBIAYAAN NETO (59-65)		520,366,757,061.54	115,100,254,965.69	22.12%	(93,757,582,757.16)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (54+66)	5.1.4.	-	-	23,419,735,788.56		15,600,869,420.54

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2023

TABEL 3.36
PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN MISI VISI DAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	290.851.843.614,00	226.526.371.208,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	282.945.485.970,00	226.363.232.491,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	134.951.033.265,00	116.153.343.547,00
Penambahan Ruang Kelas Baru	17.519.348.915,00	12.743.439.240,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.692.426.350,00	1.887.968.550,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.743.969.000,00	4.925.576.490,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah	200.000.000,00	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	29.252.089.000,00	19.947.065.150,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	53.648.500,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	79.243.200.000,00	76.595.645.617,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	130.327.015.705,00	94.072.037.544,00
Penambahan Ruang Kelas Baru	32.267.404.105,00	30.480.445.505,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	3.131.104.100,00	1.054.992.875,00
Pengadaan Mebel Sekolah	1.500.000.000,00	5.576.650,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa	9.848.972.500,00	4.662.872.500,00
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.669.035.000,00	9.237.420.920,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	23.095.000.000,00	662.809.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000,00	54.498.600,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000,00	26.449.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48.315.500.000,00	47.886.972.494,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.911.537.000,00	11.585.483.300,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	823.137.000,00	675.560.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	350.000.000,00	1.335.300,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.738.400.000,00	10.908.588.000,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.755.900.000,00	4.552.368.100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	15.268.100,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.655.900.000,00	4.537.100.000,00

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.906.357.644,00	163.138.717,00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.906.357.644,00	163.138.717,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	263.857.644,00	138.244.317,00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.642.500.000,00	24.894.400,00
DINAS KESEHATAN	215.489.094.535,00	164.385.543.476,71
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	213.161.759.960,00	162.955.678.901,71
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	14.653.242.535,00	8.529.566.606,00
Pembangunan Puskesmas	2.008.389.065,00	2.008.389.065,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.271.339.730,00	228.752.330,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	74.615.000,00	74.615.000,00
Pengadaan Obat, Vaksin	6.251.902.889,00	3.205.133.775,00
Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.046.995.851,00	3.012.676.436,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.498.517.425,00	154.417.907.895,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.095.000,00	61.568.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	91.139.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.200.000,00	19.840.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.750.000,00	35.250.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.000.000,00	19.669.750,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.100.000,00	28.692.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.138.000,00	44.157.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.865.000,00	22.365.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.000.000,00	19.952.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	25.000.000,00	700.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000,00	28.356.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	32.775.000,00	31.878.000,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	87.710.500,00	86.767.450,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	13.033.394.900,00	6.988.316.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.036.517.000,00	2.657.861.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	148.971.100,00	145.253.100,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	210.118.000,00	209.519.000,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.000.000,00	29.904.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	35.000.000,00	33.904.000,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.000.000,00	28.558.400,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	79.991.087.325,00	61.525.209.925,00
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240.409.600,00	
Operasional Pelayanan Puskesmas	88.083.186.000,00	77.710.707.270,71
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.138.061.000,00	4.689.478.600,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	10.000.000,00	8.204.400,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000,00	8.204.400,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.156.300.000,00	506.300.000,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	350.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.000.000.000,00	350.000.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.300.000,00	156.300.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.300.000,00	156.300.000,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	321.839.975,00	187.107.975,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.363.975,00	25.363.975,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.363.975,00	25.363.975,00
Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	156.740.000,00	91.660.000,00

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	156.740.000,00	91.660.000,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	139.736.000,00	70.084.000,00
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	139.736.000,00	70.084.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	849.194.600,00	736.456.600,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	508.834.000,00	407.866.400,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	508.834.000,00	407.866.400,00
Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	340.360.600,00	328.590.200,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	340.360.600,00	328.590.200,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	629.867.044.733,16	431.132.635.165,15
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.889.091.750,00	13.248.560.770,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.889.091.750,00	13.248.560.770,00
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	414.867.000,00	414.380.100,00
Normalisasi/Restorasi Sungai	20.474.224.750,00	12.834.180.670,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.744.414.830,00	7.361.459.940,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.744.414.830,00	7.361.459.940,00
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.744.414.830,00	7.361.459.940,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.792.990.455,00	5.003.537.105,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.792.990.455,00	5.003.537.105,00
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	7.792.990.455,00	5.003.537.105,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	55.888.973.210,00	45.608.431.579,00
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.888.973.210,00	45.608.431.579,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	43.850.411.210,00	35.378.993.579,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	12.038.562.000,00	10.229.438.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	136.224.811.271,00	86.002.228.825,00
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	136.224.811.271,00	86.002.228.825,00
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	136.224.811.271,00	86.002.228.825,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	232.997.416.813,16	148.317.586.691,15
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	232.997.416.813,16	148.317.586.691,15
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	232.997.416.813,16	148.317.586.691,15
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	163.759.396.404,00	124.753.725.808,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	163.759.396.404,00	124.753.725.808,00
Pembangunan Jalan	124.246.555.470,00	93.641.955.178,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	24.746.079.800,00	20.850.083.800,00
Pembangunan Jembatan	10.626.054.834,00	7.182.318.830,00
Pemeliharaan Rutin jembatan	4.140.706.300,00	3.079.368.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.022.550.000,00	296.994.247,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.022.550.000,00	296.994.247,00
Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	272.550.000,00	95.084.321,00
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	230.000.000,00	43.748.991,00
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	520.000.000,00	158.160.935,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	547.400.000,00	540.110.200,00
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	547.400.000,00	540.110.200,00
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	547.400.000,00	540.110.200,00
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	8.492.395.182,00	431.682.750,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	590.698.394,00	282.961.450,00

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	590.698.394,00	282.961.450,00
Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	575.698.394,00	268.553.050,00
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.408.400,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	244.998.394,00	126.295.200,00
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	244.998.394,00	126.295.200,00
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	244.998.394,00	126.295.200,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.065.998.394,00	538.584.937,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	2.065.998.394,00	538.584.937,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.775.000.000,00	508.539.937,00
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	75.000.000,00	14.756.700,00
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	215.998.394,00	15.288.300,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.000.000,00	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.515.700.000,00	22.426.100,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.515.700.000,00	22.426.100,00
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5.440.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	75.700.000,00	22.426.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	25.000.000,00	
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	25.000.000,00	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	959.482.617,00	215.996.500,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	959.482.617,00	215.996.500,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	661.095.357,00	215.996.500,00
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	209.124.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10.972.500,00	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	150.000.000,00	29.968.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	290.998.857,00	186.028.500,00
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	298.387.260,00	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	174.252.260,00	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	124.135.000,00	
DINAS SOSIAL	9.448.809.687,00	5.960.433.635,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	335.000.000,00	122.544.895,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	145.000.000,00	107.428.845,00
Penyediaan Permakanan	85.000.000,00	73.136.435,00
Penyediaan Sandang	60.000.000,00	34.292.410,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	190.000.000,00	15.116.050,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.000.000,00	4.095.000,00
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	170.000.000,00	11.021.050,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.063.809.687,00	897.629.890,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.063.809.687,00	897.629.890,00

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	454.559.687,00	30.488.032,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.609.250.000,00	867.141.858,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.050.000.000,00	4.940.258.850,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	5.050.000.000,00	4.940.258.850,00
Penyediaan Makanan	5.050.000.000,00	4.940.258.850,00
DINAS TENAGA KERJA	838.225.307,00	427.388.939,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	186.238.039,00	169.499.939,00
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	132.838.367,00	132.750.267,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	132.838.367,00	132.750.267,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.199.843,00	16.199.843,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.199.843,00	16.199.843,00
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	37.199.829,00	20.549.829,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	37.199.829,00	20.549.829,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	224.999.918,00	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	224.999.918,00	
Job fair/Bursa Kerja	224.999.918,00	
Program Hubungan Industrial	389.016.550,00	257.889.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	301.650.900,00	257.889.000,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	301.650.900,00	257.889.000,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	87.365.650,00	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.365.650,00	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	37.970.800,00	
Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	37.970.800,00	
Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	37.970.800,00	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.365.800.000,00	1.679.197.380,00
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.040.000.000,00	446.447.600,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.040.000.000,00	446.447.600,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.040.000.000,00	446.447.600,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	337.950.000,00	294.442.600,00
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	162.950.000,00	139.155.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.950.000,00	96.950.000,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	42.205.000,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	108.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	108.000.000,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.287.600,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.287.600,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	187.500.000,00	144.793.460,00
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	187.500.000,00	144.793.460,00
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26.000.000,00	26.000.000,00
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	161.500.000,00	118.793.460,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	36.500.000,00	32.300.000,00
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	36.500.000,00	32.300.000,00
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	36.500.000,00	32.300.000,00

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	150.000.000,00	149.649.920,00
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.649.920,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.649.920,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	613.850.000,00	611.563.800,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	537.044.000,00	535.098.800,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kotaa	137.044.000,00	135.300.000,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	399.798.800,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000,00	76.465.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan (DAK)	76.806.000,00	76.465.000,00
DINAS PANGAN	4.529.204.125,00	4.315.266.520,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.240.204.125,00	4.092.249.920,00
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	275.428.125,00	178.308.900,00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	44.020.000,00	39.427.400,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	30.800.000,00	2.412.500,00
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	200.608.125,00	136.469.000,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.700.000.000,00	3.699.956.920,00
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.700.000.000,00	3.699.956.920,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	264.776.000,00	213.984.100,00
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	34.620.000,00	28.267.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	230.156.000,00	185.717.100,00

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	149.000.000,00	142.267.900,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	49.000.000,00	43.785.300,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	49.000.000,00	43.785.300,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	100.000.000,00	98.482.600,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.482.600,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	140.000.000,00	80.748.700,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	80.748.700,00
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	10.976.600,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.772.100,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.877.938.200,00	1.920.872.000,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	358.182.000,00	158.182.000,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	358.182.000,00	158.182.000,00
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	358.182.000,00	158.182.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	275.000.000,00	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175.000.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	75.000.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000,00	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000,00	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	50.000.000,00	

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	475.850.000,00	227.710.400,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	475.850.000,00	227.710.400,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	475.850.000,00	227.710.400,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	70.000.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	70.000.000,00	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.648.906.200,00	1.534.979.600,00
Pengelolaan Sampah	1.648.906.200,00	1.534.979.600,00
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.185.000.000,00	1.076.837.000,00
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	200.000.000,00	198.037.800,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	263.906.200,00	260.104.800,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	162.363.497,00	65.675.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	162.363.497,00	65.675.000,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162.363.497,00	65.675.000,00
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.360.860,00	57.675.000,00
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	60.002.637,00	8.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.150.500.000,00	520.766.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	400.000.000,00	310.027.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	400.000.000,00	310.027.000,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	200.000.000,00	158.171.000,00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200.000.000,00	151.856.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	750.500.000,00	210.739.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.500.000,00	210.739.000,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	1.000.000,00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	175.000.000,00	119.224.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	400.500.000,00	90.515.000,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	27.801.380.202,00	6.603.299.282,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	70.000.000,00	35.940.000,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000,00	35.940.000,00
Pemetaan Kependudukan	20.000.000,00	11.740.000,00
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	20.000.000,00	9.950.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30.000.000,00	14.250.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	20.163.552.202,00	4.712.418.782,00
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	274.000.000,00	77.455.000,00
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	55.000.000,00	28.505.000,00
Promosi dan KIE program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Ruang Elektronik serta Media Luar	199.000.000,00	30.000.000,00
Pengendalian Program KKBPK	20.000.000,00	18.950.000,00
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	11.235.884.900,00	3.230.456.980,00
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.425.024.900,00	1.047.246.980,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	9.810.860.000,00	2.183.210.000,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	8.156.663.802,00	1.212.318.802,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	20.000.000,00	11.150.000,00
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	40.000.000,00	39.475.000,00
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7.981.717.000,00	1.125.997.000,00
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	114.946.802,00	35.696.802,00

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	497.003.500,00	192.188.000,00
Pembinaan Terpadu Kampung KB	497.003.500,00	192.188.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.567.828.000,00	1.854.940.500,00
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.169.178.000,00	1.831.115.500,00
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemb	6.193.831.500,00	1.384.765.500,00
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45.000.000,00	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	930.346.500,00	446.350.000,00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	398.650.000,00	23.825.000,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.000.000,00	23.825.000,00
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	373.650.000,00	
DINAS PERHUBUNGAN	7.011.037.635,00	6.354.109.774,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.745.837.635,00	6.190.759.774,00
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3.189.240.000,00	2.847.942.000,00
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	384.520.000,00	344.520.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.804.720.000,00	2.503.422.000,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	449.674.709,00	384.425.500,00
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	140.000.000,00	97.850.500,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	197.600.000,00	197.600.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	112.074.709,00	88.975.000,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	30.000.000,00	29.687.500,00

Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.000.000,00	29.687.500,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.046.922.926,00	2.899.009.774,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.713.252.926,00	2.577.059.774,00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	299.150.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.000.000,00	22.800.000,00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.670.000,00	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.695.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.695.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	265.200.000,00	163.350.000,00
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	235.200.000,00	163.350.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	235.200.000,00	163.350.000,00
DINAS KOPERASI	3.981.200.000,00	3.283.137.438,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000,00	61.145.000,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	61.145.000,00
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.970.000,00
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	17.175.000,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	75.000.000,00	41.139.364,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	41.139.364,00

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	41.139.364,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000,00	383.388.000,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	404.200.000,00	383.388.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000,00	383.388.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.937.000.000,00	1.671.450.000,00
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.937.000.000,00	1.671.450.000,00
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Provinsi	1.937.000.000,00	1.671.450.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	796.000.000,00	491.000.000,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	796.000.000,00	491.000.000,00
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000,00	
Fasilitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	50.000.000,00	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	526.000.000,00	491.000.000,00
Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	170.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	669.000.000,00	635.015.074,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	669.000.000,00	635.015.074,00
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	669.000.000,00	635.015.074,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.621.536.000,00	673.089.456,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	653.122.000,00	65.174.998,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	653.122.000,00	65.174.998,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	653.122.000,00	65.174.998,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	584.500.000,00	392.818.458,00

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	584.500.000,00	392.818.458,00
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	434.500.000,00	292.412.800,00
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	150.000.000,00	100.405.658,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	383.914.000,00	215.096.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	383.914.000,00	215.096.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	345.155.000,00	183.596.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	38.759.000,00	31.500.000,00
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.481.643.486,00	7.720.991.072,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	463.587.548,00	441.553.500,00
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	29.998.991,00	12.659.500,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	29.998.991,00	12.659.500,00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	433.588.557,00	428.894.000,00
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	433.588.557,00	428.894.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.018.055.938,00	6.279.437.572,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.978.482,00	5.800.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	24.978.482,00	5.800.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota	2.703.160.000,00	207.010.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.703.160.000,00	207.010.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.054.951.400,00	5.900.060.000,00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.054.951.400,00	5.900.060.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	234.966.056,00	166.567.572,00
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	190.000.000,00	121.657.500,00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	44.966.056,00	44.910.072,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	515.000.000,00	332.052.369,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	515.000.000,00	332.052.369,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000,00	305.061.369,00
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	300.000.000,00	231.259.869,00
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.611.500,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	50.000.000,00	49.190.000,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000,00	26.991.000,00
Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	25.000.000,00	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	50.000.000,00	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	35.000.000,00	26.991.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.214.390.000,00	330.038.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	346.410.000,00	62.624.900,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	186.410.000,00	24.300.000,00
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	186.410.000,00	24.300.000,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	160.000.000,00	38.324.900,00
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	160.000.000,00	38.324.900,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	222.980.000,00	186.016.700,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	161.980.000,00	126.900.000,00
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	161.980.000,00	126.900.000,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	61.000.000,00	59.116.700,00
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.000.000,00	59.116.700,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	34.597.000,00
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	150.000.000,00	34.597.000,00
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	150.000.000,00	34.597.000,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	495.000.000,00	46.800.000,00
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	35.000.000,00	34.300.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.300.000,00
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	460.000.000,00	12.500.000,00
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	460.000.000,00	12.500.000,00
DINAS PARIWISATA	1.368.000.000,00	825.005.803,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	350.000.000,00	68.864.203,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000,00	68.864.203,00
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	35.000.000,00	3.876.415,00
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	315.000.000,00	64.987.788,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	191.000.000,00	140.793.000,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	191.000.000,00	140.793.000,00
Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	45.000.000,00	10.489.000,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	146.000.000,00	130.304.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	50.000.000,00	45.887.500,00
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	45.887.500,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	45.887.500,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	777.000.000,00	569.461.100,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	777.000.000,00	569.461.100,00
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	250.000.000,00	156.137.500,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	453.000.000,00	412.374.600,00
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	37.000.000,00	949.000,00
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	37.000.000,00	
DINAS PERTANIAN	1.739.992.733,00	1.240.059.488,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	918.346.222,00	526.206.238,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	191.846.100,00	177.175.280,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	126.846.100,00	125.599.280,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	65.000.000,00	51.576.000,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	726.500.122,00	349.030.958,00
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	260.000.000,00	240.894.500,00
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	466.500.122,00	108.136.458,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	30.000.000,00	15.612.750,00
Pengembangan Prasarana Pertanian	30.000.000,00	15.612.750,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	30.000.000,00	15.612.750,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	720.346.511,00	652.740.500,00
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	72.645.500,00
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	85.000.000,00	72.645.500,00
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000,00	292.870.000,00
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	330.000.000,00	292.870.000,00
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	132.846.511,00	117.025.000,00
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	132.846.511,00	117.025.000,00

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	172.500.000,00	170.200.000,00
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	172.500.000,00	170.200.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	71.300.000,00	45.500.000,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	71.300.000,00	45.500.000,00
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	71.300.000,00	45.500.000,00
DINAS PERDAGANGAN	5.340.400.000,00	4.313.538.182,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.890.000.000,00	1.219.817.600,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.890.000.000,00	1.219.817.600,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.890.000.000,00	1.219.817.600,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.690.550.000,00	2.444.360.708,00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	2.690.550.000,00	2.444.360.708,00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	100.000.000,00	91.577.250,00
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.590.550.000,00	2.352.783.458,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	559.850.000,00	548.829.774,00
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	559.850.000,00	548.829.774,00
Pameran Dagang Nasional	559.850.000,00	548.829.774,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	200.000.000,00	100.530.100,00
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	200.000.000,00	100.530.100,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100.000.000,00	61.918.350,00
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100.000.000,00	38.611.750,00
DINAS PERINDUSTRIAN	4.939.434.045,00	3.119.637.333,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.779.434.045,00	3.075.970.264,00
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.779.434.045,00	3.075.970.264,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dana APBD dan DAK)	1.705.822.755,00	1.305.822.755,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.048.611.290,00	1.770.147.509,00
Evaluasi Terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	25.000.000,00	

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	36.054.445,00
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	36.054.445,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informa	50.000.000,00	18.097.213,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	17.957.232,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000,00	7.612.624,00
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	7.612.624,00
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	60.000.000,00	7.612.624,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.365.962.304,00	2.296.383.659,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.570.738.986,00	763.049.052,00
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.589.522.031,00	267.146.999,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	44.700.000,00	24.012.700,00
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	565.072.930,00	10.226.982,00
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	489.373.031,00	9.119.031,00
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	74.258.000,00	26.956.000,00
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	127.008.400,00	18.379.574,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	66.098.971,00	45.298.776,00
Pengelolaan Data Kepegawaian	181.604.916,00	122.800.000,00
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	41.405.783,00	10.353.936,00
Mutasi dan Promosi ASN	309.277.355,00	188.368.031,00
Pengelolaan Mutasi ASN	100.077.355,00	84.964.754,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	130.000.000,00	46.184.350,00
Pengelolaan Promosi ASN	79.200.000,00	57.218.927,00
Pengembangan Kompetensi ASN	1.436.839.600,00	138.342.907,00
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100.000.000,00	82.262.151,00
Pengelolaan Assessment Center	84.000.000,00	

Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	134.863.200,00	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.043.000.000,00	37.102.364,00
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	32.726.400,00	1.878.392,00
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	19.600.000,00	17.100.000,00
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	22.650.000,00	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	235.100.000,00	169.191.115,00
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	101.896.272,00	82.124.351,00
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	37.942.524,00	25.782.603,00
Pembinaan Disiplin ASN	37.611.204,00	18.534.512,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32.650.000,00	29.311.993,00
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	25.000.000,00	13.437.656,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.795.223.318,00	1.533.334.607,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.795.223.318,00	1.533.334.607,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.310.250.000,00	1.228.929.095,00
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,	484.973.318,00	304.405.512,00
SEKRETARIAT DAERAH	154.029.157.252,91	111.176.966.876,05
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	112.926.424.753,91	85.732.791.160,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.920.000,00	279.932.668,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.000.000,00	98.403.089,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122.000.000,00	105.041.179,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.920.000,00	76.488.400,00
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	52.215.468.922,91	44.092.686.989,00
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	51.339.248.922,91	43.485.607.369,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	427.800.000,00	224.650.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.449.491,00	169.149.491,00
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	194.969.509,00	159.809.129,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	58.001.000,00	53.471.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.314.250,00	113.525.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	247.500.000,00	113.525.000,00

Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	26.814.250,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.656.520.915,00	8.624.882.177,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.312.500,00	59.796.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	541.865.440,00	387.151.100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	494.033.654,00	440.371.214,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.356.000.000,00	1.157.893.100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	586.164.600,00	405.115.460,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.644.493.971,00	1.267.186.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	4.870.000.000,00	3.882.764.790,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.072.650.750,00	1.024.604.513,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.002.231.306,00	7.211.214.500,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.910.000.000,00	2.530.200.000,00
Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	6.300.000.000,00	1.815.000.000,00
Pengadaan Mebel	1.173.050.000,00	454.550.000,00
Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	4.619.181.306,00	2.411.464.500,00
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.696.635.000,00	13.941.484.743,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.855.385.000,00	3.984.464.743,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	505.000.000,00	385.020.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.336.250.000,00	9.572.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.904.761.536,00	6.502.005.653,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.558.761.536,00	2.336.695.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	155.486.916,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470.000.000,00	249.700.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	626.000.000,00	484.719.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.050.000.000,00	3.275.404.137,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.430.503.824,00	1.100.468.699,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	1.430.503.824,00	1.100.468.699,00
Penataan Organisasi	481.445.350,00	270.982.156,00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	209.567.350,00	96.600.886,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	143.464.500,00	95.995.344,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	128.413.500,00	78.385.926,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.787.623.650,00	3.595.608.575,00
Fasilitasi Keprotokolan	1.519.013.750,00	1.356.844.934,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	212.277.900,00	197.336.049,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.056.332.000,00	2.041.427.592,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.494.580.449,00	22.156.975.723,05
Administrasi Tata Pemerintahan	3.962.837.930,00	2.568.201.973,00
Penataan Administrasi Pemerintahan	50.050.000,00	2.282.200,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	608.224.030,00	24.686.420,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.304.563.900,00	2.541.233.353,00
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	32.367.173.437,00	18.682.420.326,05
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	31.874.554.137,00	18.682.420.326,05
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	400.000.000,00	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	92.619.300,00	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	677.198.553,00	538.351.924,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	144.425.000,00	114.191.958,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	344.143.553,00	252.239.267,00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	188.630.000,00	171.920.699,00
Fasilitasi Kerjasama Daerah	487.370.529,00	368.001.500,00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	269.631.429,00	158.307.500,00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	92.515.600,00	88.536.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	125.223.500,00	121.158.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.608.152.050,00	3.287.199.993,00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	787.115.000,00	746.682.198,00
Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	93.800.000,00	79.997.790,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	264.515.000,00	254.227.148,00
Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	78.800.000,00	73.979.260,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	350.000.000,00	338.478.000,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.635.035.000,00	1.394.301.853,00
fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	113.675.000,00	98.025.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.150.060.000,00	969.026.853,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	371.300.000,00	327.250.000,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

Pengelolaan Pengadaan Barang	1.186.002.050,00	1.146.215.942,00
Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	400.000.000,00	386.267.565,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	650.000.000,00	639.999.670,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	136.002.050,00	119.948.707,00
SEKRETARIAT DPRD	106.973.825.584,64	74.156.913.723,00
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	63.872.275.345,64	50.556.522.156,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	473.252.871,00	230.562.100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.435.000,00	64.086.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	53.004.000,00	43.237.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	53.004.000,00	43.240.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127.008.680,00	12.193.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.801.191,00	67.804.800,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.980.861.103,00	5.489.183.472,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.124.667.103,00	4.827.274.386,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	507.200.000,00	323.137.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.020.000,00	75.859.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	235.615.000,00	228.298.510,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.359.000,00	34.614.076,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.000.000,00	37.944.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000,00	37.944.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.271.817.301,64	1.373.316.516,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.550.000,00	43.294.805,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	133.043.473,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	128.385.500,00	82.298.470,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	596.500.000,00	419.018.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	348.000.000,00	88.099.540,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	684.250.000,00	103.250.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	165.000.000,00	13.937.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1.148.131.801,64	490.374.728,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

Konsultasi SKPD		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.091.675.440,00	656.651.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	78.724.000,00
Pengadaan Mebel	593.750.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242.500.000,00	121.100.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.175.425.440,00	456.827.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.674.200.000,00	5.634.593.958,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.100.000,00	19.604.750,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	516.000.000,00	432.989.208,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.105.100.000,00	5.182.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.551.980.000,00	979.671.550,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.675.000,00	22.614.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585.805.000,00	209.261.300,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.500.000,00	152.670.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	736.000.000,00	595.125.750,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	39.323.652.160,00	35.054.580.806,00
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	37.432.152.160,00	34.144.580.806,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.741.500.000,00	910.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	
Layanan Administrasi DPRD	3.294.836.470,00	1.100.018.754,00
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	276.000.000,00	166.440.108,00
Fasilitas Fraksi DPRD	49.000.000,00	40.879.184,00
Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.981.105.286,00	266.226.400,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	988.731.184,00	626.473.062,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	43.101.550.239,00	23.600.391.567,00
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9.334.309.979,00	3.239.729.481,00
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.570.843.000,00	465.487.739,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.780.305.499,00	1.963.176.742,00
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	119.000.000,00	
Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	827.605.000,00	811.065.000,00
Penyusunan Tata Tertib DPRD	36.556.480,00	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.288.000.000,00	1.480.771.370,00
Pembahasan KUA dan PPAS	600.000.000,00	251.227.700,00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	700.000.000,00	276.159.703,00
Pembahasan APBD	688.000.000,00	271.438.076,00
Pembahasan APBD Perubahan	700.000.000,00	317.735.021,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	600.000.000,00	364.210.870,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.301.955.363,00	4.179.702.712,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.492.730.733,00	688.586.970,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.370.730.733,00	725.490.875,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.473.670.279,00	1.086.393.750,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.370.730.733,00	975.132.471,00
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.121.360.000,00	536.786.654,00
Pengawasan Penggunaan Anggaran	92.032.885,00	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	380.700.000,00	167.311.992,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	16.353.631.273,00	12.671.203.805,00
Orientasi DPRD	100.000.000,00	
Pendalaman Tugas DPRD	3.632.125.800,00	2.330.418.292,00
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8.703.505.473,00	7.172.785.513,00
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.592.000.000,00	2.592.000.000,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	576.000.000,00	576.000.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	250.000.000,00	
Penyusunan Program Kerja DPRD	500.000.000,00	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.688.028.891,00	32.351.300,00
Kunjungan Kerja dalam Daerah	100.000.000,00	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	70.000.000,00	28.358.800,00
Pelaksanaan Reses	2.518.028.891,00	3.992.500,00
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.214.000.000,00	342.647.560,00
Penyusunan Kode Etik DPRD	664.000.000,00	209.391.315,00
Pengawasan Kode Etik DPRD	550.000.000,00	133.256.245,00
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.921.624.733,00	1.653.985.339,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.614.856.733,00	804.677.087,00
Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	75.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.231.768.000,00	849.308.252,00
INSPEKTORAT	6.552.830.920,00	4.648.987.495,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.262.016.920,00	3.070.882.425,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.882.018.342,00	2.740.048.647,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.100.000.000,00	1.593.933.246,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	600.000.000,00	307.099.275,00
Reviu Laporan Kinerja	600.000.000,00	366.435.136,00
Reviu Laporan Keuangan	240.000.000,00	196.551.890,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	342.018.342,00	276.029.100,00
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	379.998.578,00	330.833.778,00
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.498.584,00	8.848.584,00
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	327.499.994,00	321.985.194,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	2.290.814.000,00	1.578.105.070,00
Pendampingan dan Asistensi	2.290.814.000,00	1.578.105.070,00
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000,00	181.721.060,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52.500.000,00	47.906.000,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.975.000.000,00	1.348.478.010,00
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13.314.000,00	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.874.901.415,00	2.897.595.611,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	312.799.857,00	49.998.540,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	312.799.857,00	49.998.540,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.999.896,00	49.998.540,00
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	112.800.079,00	
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	149.999.882,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	1.562.102.504,00	1.334.604.830,00

MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemant	1.562.102.504,00	1.334.604.830,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	111.795.207,00	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan	1.450.307.297,00	1.334.604.830,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	917.299.862,00	716.096.240,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	917.299.862,00	716.096.240,00
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	770.599.957,00	716.096.240,00
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	146.699.905,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	571.499.615,00	384.695.180,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	571.499.615,00	384.695.180,00
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	99.999.973,00	
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	74.999.813,00	

Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	396.499.829,00	384.695.180,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	511.199.577,00	412.200.821,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	511.199.577,00	412.200.821,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfl	63.500.000,00	53.417.971,00
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	149.999.840,00	117.658.240,00
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	257.499.791,00	210.878.680,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penang	40.199.946,00	30.245.930,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.096.611.241,00	348.688.600,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	642.977.741,00	159.190.600,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	642.977.741,00	159.190.600,00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	456.000.000,00	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	159.190.600,00	159.190.600,00

Kabupaten / Kota		
Penyusunan Rencana Kontijensi	27.787.141,00	
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	453.633.500,00	189.498.000,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	453.633.500,00	189.498.000,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	453.633.500,00	189.498.000,00
KECAMATAN TANJUNGPUSAT	9.907.444.747,00	5.396.875.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.776.444.747,00	3.157.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.800.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.800.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.740.644.747,00	3.157.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.740.644.747,00	3.157.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	524.600.000,00	171.625.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	524.600.000,00	171.625.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	524.600.000,00	171.625.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.604.400.000,00	2.068.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.604.400.000,00	2.068.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.581.400.000,00	2.057.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.000.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	500.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	1.000.000,00	

PEMERINTAHAN DESA		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	500.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	500.000,00	
KECAMATAN TANJUNGPANG BARAT	9.589.758.455,00	5.188.034.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.395.363.814,00	2.950.887.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.931.907,00	2.138.500,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.931.907,00	2.138.500,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.359.431.907,00	2.948.748.500,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.359.431.907,00	2.948.748.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	714.181.907,00	252.123.500,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	714.181.907,00	252.123.500,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	714.181.907,00	252.123.500,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.452.177.882,00	1.980.998.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.452.177.882,00	1.980.998.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.428.681.907,00	1.969.748.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.495.975,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.317.426,00	4.025.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.317.426,00	4.025.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.833.713,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.483.713,00	4.025.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	13.717.426,00	

PEMERINTAHAN DESA		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.717.426,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.483.713,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.233.713,00	
KECAMATAN TANJUNGPANG	7.460.708.500,00	4.029.875.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.242.040.000,00	2.310.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.840.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.840.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.211.200.000,00	2.310.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.211.200.000,00	2.310.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	398.150.000,00	119.125.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	398.150.000,00	119.125.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	398.150.000,00	119.125.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.798.518.500,00	1.600.750.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.798.518.500,00	1.600.750.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.775.420.000,00	1.589.500.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.098.500,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	11.000.000,00	

PEMERINTAHAN DESA		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000,00	
KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA	10.074.628.100,00	5.328.469.700,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.971.897.500,00	3.140.824.200,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.565.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.565.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.940.332.500,00	3.140.824.200,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.940.332.500,00	3.140.824.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	567.285.600,00	172.165.500,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	567.285.600,00	172.165.500,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	567.285.600,00	172.165.500,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.499.445.000,00	2.011.453.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.499.445.000,00	2.011.453.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.475.270.000,00	1.998.993.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.175.000,00	12.460.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.500.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.500.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	4.026.500,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000,00	4.026.500,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.500.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	6.500.000,00	4.026.500,00

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT	7.119.798.580,00	3.862.332.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.927.130.000,00	2.122.511.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.255.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.255.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.900.875.000,00	2.122.511.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.900.875.000,00	2.122.511.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	507.335.460,00	211.821.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	507.335.460,00	211.821.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	507.335.460,00	211.821.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.665.356.530,00	1.528.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.665.356.530,00	1.528.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.623.356.530,00	1.507.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	42.000.000,00	21.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.998.825,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.998.825,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.999.839,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.998.986,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.977.765,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.977.765,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.979.112,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.998.653,00	

KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN	9.439.004.200,00	5.103.750.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.490.404.200,00	3.003.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.288.700,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.288.700,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.460.115.500,00	3.003.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.460.115.500,00	3.003.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	523.373.000,00	138.375.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	523.373.000,00	138.375.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	523.373.000,00	138.375.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.381.227.000,00	1.941.750.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.381.227.000,00	1.941.750.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.358.611.500,00	1.930.500.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.615.500,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.000.000,00	10.312.500,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.000.000,00	10.312.500,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	10.312.500,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.000.000,00	10.312.500,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.000.000,00	10.312.500,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000,00	10.312.500,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.000.000,00	
KECAMATAN KEDATON	9.588.244.468,00	5.219.412.200,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.561.974.724,00	3.038.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.140.264,00	

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.140.264,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.527.834.460,00	3.038.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.527.834.460,00	3.038.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	532.658.718,00	179.162.200,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	532.658.718,00	179.162.200,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	532.658.718,00	179.162.200,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.491.045.125,00	2.002.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.491.045.125,00	2.002.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.468.170.800,00	1.991.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.874.325,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	842.573,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	842.573,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	400.429,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	442.144,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.723.328,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.723.328,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	872.764,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	850.564,00	
KECAMATAN SUKARAME	8.296.703.770,00	4.484.578.170,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.701.161.470,00	2.586.061.470,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.680.000,00	5.680.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.680.000,00	5.680.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.666.481.470,00	2.580.381.470,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.666.481.470,00	2.580.381.470,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	556.026.749,00	186.811.749,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	556.026.749,00	186.811.749,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	556.026.749,00	186.811.749,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.035.515.551,00	1.711.704.951,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.035.515.551,00	1.711.704.951,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.008.535.100,00	1.700.174.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	26.980.451,00	11.530.451,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.000.000,00	
KECAMATAN PANJANG	14.521.674.344,00	7.870.750.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.695.545.800,00	4.754.750.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.555.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.555.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.655.990.800,00	4.754.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.655.990.800,00	4.754.750.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915.395.000,00	310.750.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	915.395.000,00	310.750.000,00

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	915.395.000,00	310.750.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.889.733.544,00	2.805.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.889.733.544,00	2.805.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4.865.120.000,00	2.794.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.613.544,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN RAJABASA	8.146.330.000,00	4.337.994.386,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.440.702.500,00	2.409.869.386,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.140.000,00	3.156.882,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.140.000,00	3.156.882,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.397.562.500,00	2.406.712.504,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.397.562.500,00	2.406.712.504,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	618.905.000,00	183.875.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	618.905.000,00	183.875.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	618.905.000,00	183.875.000,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.066.722.500,00	1.744.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.066.722.500,00	1.744.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.042.160.000,00	1.733.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.562.500,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN TANJUNG SENANG	7.845.632.385,00	4.220.499.113,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.436.871.611,00	2.420.369.700,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.052.839,00	52.800,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.052.839,00	52.800,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.411.818.772,00	2.420.316.900,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.411.818.772,00	2.420.316.900,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	482.566.049,00	157.943.250,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	482.566.049,00	157.943.250,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	482.566.049,00	157.943.250,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.888.486.965,00	1.634.486.600,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.888.486.965,00	1.634.486.600,00

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.865.325.087,00	1.622.575.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.161.878,00	11.911.600,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.804.576,00	4.800.713,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.804.576,00	4.800.713,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.957.632,00	2.455.913,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.846.944,00	2.344.800,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.903.184,00	2.898.850,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.903.184,00	2.898.850,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.951.592,00	1.449.425,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.951.592,00	1.449.425,00
KECAMATAN SUKABUMI	10.466.768.157,00	5.683.511.870,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.102.028.180,00	3.332.150.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.022.352,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.022.352,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.059.005.828,00	3.332.150.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.059.005.828,00	3.332.150.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	594.222.610,00	206.049.370,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	594.222.610,00	206.049.370,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	594.222.610,00	206.049.370,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.732.809.607,00	2.142.500.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.732.809.607,00	2.142.500.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.710.056.530,00	2.131.250.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.753.077,00	11.250.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.804.576,00	2.812.500,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.804.576,00	2.812.500,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.957.632,00	2.812.500,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.846.944,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.903.184,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.903.184,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.951.592,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.951.592,00	
KECAMATAN KEMILING	15.935.468.000,00	8.685.838.500,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.780.719.000,00	5.335.155.350,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.210.000,00	2.611.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	80.210.000,00	2.611.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.700.509.000,00	5.332.544.350,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.700.509.000,00	5.332.544.350,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	722.849.000,00	235.750.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	722.849.000,00	235.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	722.849.000,00	235.750.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.419.900.000,00	3.114.933.150,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.419.900.000,00	3.114.933.150,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	5.397.400.000,00	3.103.683.150,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.500.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN ENGGAL	8.167.770.970,00	4.253.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.607.530.000,00	2.423.750.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.210.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.210.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.566.320.000,00	2.423.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.566.320.000,00	2.423.750.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	522.409.370,00	99.000.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	522.409.370,00	99.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	522.409.370,00	99.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.017.831.600,00	1.730.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.017.831.600,00	1.730.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.993.831.600,00	1.707.750.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.000.000,00	22.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN KEDAMAIAN	9.142.942.188,00	4.928.020.100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.079.441.200,00	2.777.401.200,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.685.600,00	2.645.600,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.685.600,00	2.645.600,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.042.755.600,00	2.774.755.600,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.042.755.600,00	2.774.755.600,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	725.385.500,00	236.385.500,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	725.385.500,00	236.385.500,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	725.385.500,00	236.385.500,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.335.633.400,00	1.914.233.400,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.335.633.400,00	1.914.233.400,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.313.033.400,00	1.902.983.400,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.600.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.241.044,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.241.044,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	620.522,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	620.522,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.241.044,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.241.044,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	620.522,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	620.522,00	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2022

KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR	7.545.055.000,00	4.013.644.200,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.085.150.000,00	2.221.973.700,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.075.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32.075.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.053.075.000,00	2.221.973.700,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.053.075.000,00	2.221.973.700,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	611.475.000,00	177.124.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	611.475.000,00	177.124.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	611.475.000,00	177.124.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.828.430.000,00	1.614.546.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.828.430.000,00	1.614.546.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.803.430.000,00	1.603.296.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.000.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN BUMI WARAS	9.735.504.000,00	5.297.352.381,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.683.670.000,00	3.113.650.000,00

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.070.000,00	900.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.070.000,00	900.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.653.600.000,00	3.112.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.653.600.000,00	3.112.750.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	637.760.000,00	222.750.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	637.760.000,00	222.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	637.760.000,00	222.750.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.394.074.000,00	1.948.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.394.074.000,00	1.948.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.370.074.000,00	1.936.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.000.000,00	12.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	5.997.938,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	5.997.938,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	2.470.569,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	3.527.369,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	6.954.443,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	6.954.443,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.189.254,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	2.765.189,00
KECAMATAN LABUHAN RATU	7.240.907.500,00	3.871.865.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.012.437.500,00	2.172.822.500,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.965.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.965.000,00	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.981.472.500,00	2.172.822.500,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.981.472.500,00	2.172.822.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	368.765.000,00	97.815.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	368.765.000,00	97.815.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	368.765.000,00	97.815.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.815.705.000,00	1.601.227.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.815.705.000,00	1.601.227.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.791.650.000,00	1.589.977.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.055.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.000.000,00	
KECAMATAN WAY HALIM	11.691.169.136,00	6.423.794.136,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.028.436.336,00	3.844.186.336,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.691.700,00	1.691.700,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.691.700,00	1.691.700,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.997.744.636,00	3.842.494.636,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.997.744.636,00	3.842.494.636,00

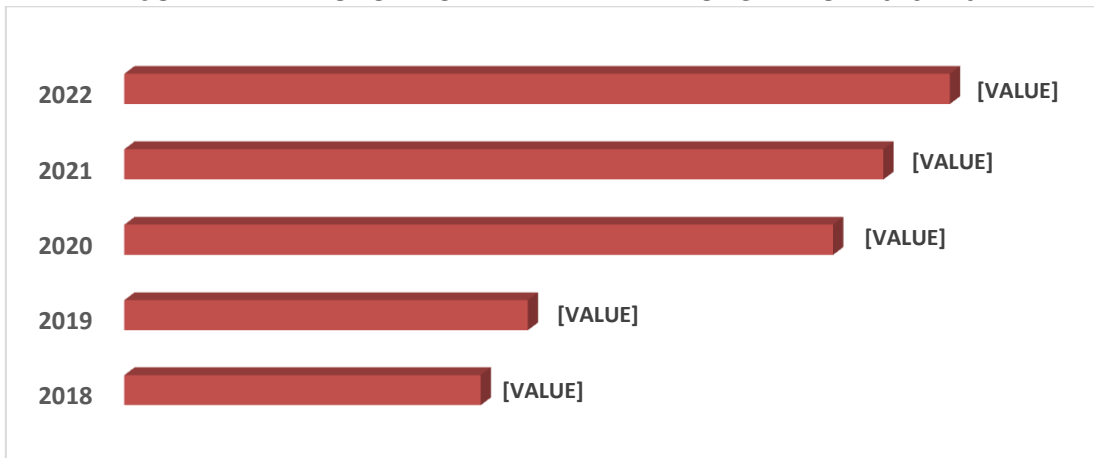
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	578.807.800,00	204.932.800,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	578.807.800,00	204.932.800,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	578.807.800,00	204.932.800,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.023.925.000,00	2.314.675.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.023.925.000,00	2.314.675.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.999.750.000,00	2.301.750.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.175.000,00	12.925.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000,00	30.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
KECAMATAN LANGKAPURA	6.077.749.500,00	3.257.425.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.243.545.750,00	1.761.003.500,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.041.000,00	14.629.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.041.000,00	14.629.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.183.504.750,00	1.746.374.500,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.183.504.750,00	1.746.374.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	446.250.750,00	147.483.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	446.250.750,00	147.483.000,00

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	446.250.750,00	147.483.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.363.628.000,00	1.348.938.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.363.628.000,00	1.348.938.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.340.453.000,00	1.337.688.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.175.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.162.500,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.162.500,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.162.500,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.162.500,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.162.500,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.162.500,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000,00	

3.4. CAPAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KABUPATEN/KOTA SERTA PROVINSI DAN NASIONAL

3.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebesar 1.184.949 jiwa dan meningkat menjadi 1.209.937 Jiwa pada Tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 24.988 jiwa atau meningkat sebesar 2,13%. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

GRAFIK 3.1**JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 - 2022**

Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, 2022

Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Lampung, maka jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2021 hanya sebesar 13,05 % dari total penduduk di Provinsi Lampung. Namun jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung, maka pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung lebih tinggi (2,11%) dibandingkan pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung (0,82%). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Bandar Lampung menjadi indikator berpindahnya aktivitas perekonomian penduduk di Kabupaten di Provinsi Lampung atau bahkan penduduk di luar Provinsi Lampung untuk pindah ke Bandar Lampung. Hal ini perlu dicermati mengingat bonus demografi pada Tahun 2030 akan membebani Kota jika penambahan penduduk tersebut tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bonus demografi yaitu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Provinsi Lampung terdiri dari 2 Kota (Metro dan Bandar Lampung) dan 12 Kabupaten.

Adapun sebaran penduduk dan jumlah penduduk per kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 3.37

**JUMLAH PENDUDUK PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018-2022**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020¹	2021²	2022³
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	300 703	302 828	302 139	302 749	303 397
Tanggamus	592 603	598 299	640 275	645 807	652 898
Lampung Selatan	1002 285	1011 286	1 064 301	1 071 727	1 081 115
Lampung Timur	1 036 193	1 044 320	1 110 340	1 118 115	1 127 946
Lampung Tengah	1 271 566	1 281 310	1 460 045	1 477 395	1 500 022
Lampung Utara	614 701	616 897	633 099	634 117	635 129
Way Kanan	446 113	450 109	473 575	476 871	481 036
Tulang Bawang	445 797	450 902	430 021	430 630	431 208
Pesawaran	440 192	444 380	477 468	481 708	487 153
Pringsewu	397 219	400 187	405 466	406 823	408 415
Mesuji	199 168	200 198	227 518	229 772	232 685
Tulang Bawang Barat	271 206	273 215	286 162	287 707	289 620
Pesisir Barat	153 743	154 895	162 697	163 641	164 816
Bandar Lampung	1 033 803	1 051 500	1 166 066	1 184 949	1 209 937
Metro	165 193	167 411	168 676	169 781	171 169
Lampung	8 370 485	8 447 737	9 007 848	9 081 792	9.176.546

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara agregate jumlah penduduk di Provinsi Lampung mengalami peningkatan, yaitu dari 9.081.792 jiwa menjadi 9.176.546 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 1,04%. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Lampung tengah yaitu sebesar 1.500.022 jiwa, disusul Kota Bandar Lampung sebesar 1.209.917 jiwa dan disusul Kabupaten Lampung Timur sebesar 1.127.946 jiwa.

Penduduk Kota Palembang lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Palembang sebanyak 1.686.073 jiwa sedangkan penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 1.184.949 jiwa atau terdapat selisih sebesar 501.124 jiwa. Adapun perbandingan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan Kota Palembang dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 3.38
PERBANDINGAN PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PALEMBANG
TAHUN 2019- 2022

NO	TAHUN	KOTA PALEMBANG	KOTA BANDAR LAMPUNG
1.	2019	1.662.893	1.051.500
2.	2020	1.668.164	1.166.066
3.	2021	1.686.073	1.184.949
4.	2022	Data belum tersedia	1.209.937

Sumber : BPS Kota Palembang dan BPS Kota Bandar Lampung, 2023

3.4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

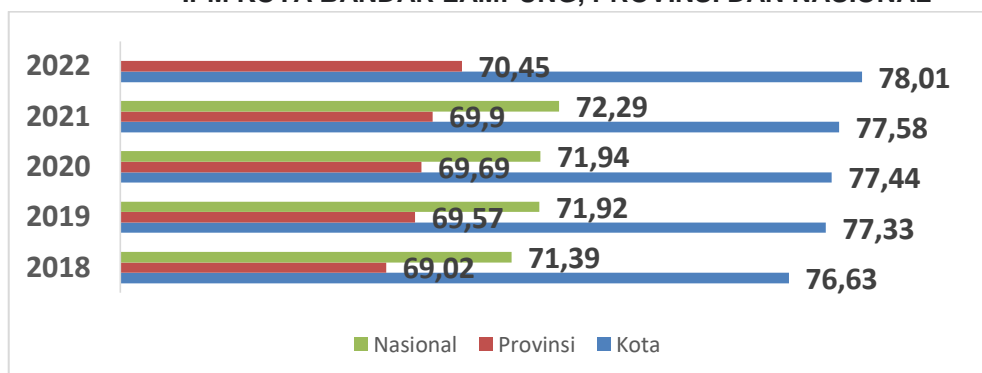
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Dalam kamus Wikipedia yang dimaksud Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, dan melebihi IPM Provinsi Lampung dan IPM Nasional. Pada tahun 2022, IPM Kota Bandar

Lampung sebesar 78,01 atau lebih tinggi dari IPM Provinsi Lampung 70,45 atau IPM Nasional 72,91. Untuk lebih jelasnya perbandingan antara IPM Kota Bandar Lampung, IPM Provinsi dan IPM Nasional dapat di lihat pada Grafik berikut.

GRAFIK 3.2

IPM KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI DAN NASIONAL



Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, 2022

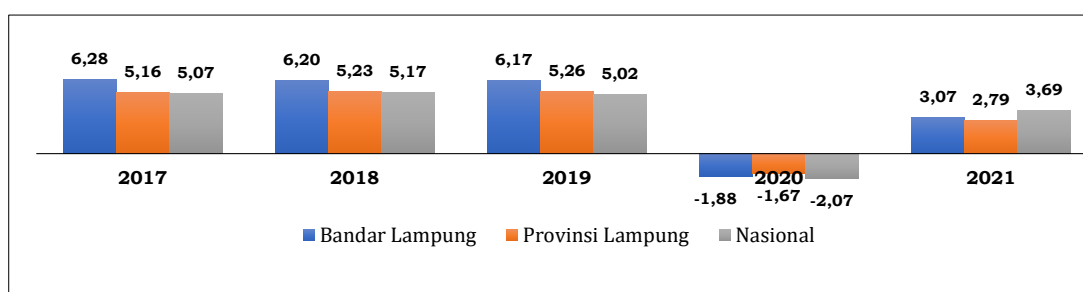
3.4.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah aspek yang mendukung serta meningkatkan kemakmuran rakyat dalam suatu negara. Adanya perubahan finansial berikut umumnya didukung dengan perkembangan teknologi dan kekuatan pasar global.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional tahun 2017 – 2021 dapat di lihat pada grafik berikut:

GRAFIK 3.3

PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL TAHUN 2017 – 2021



Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, 2023

Dari grafik di atas data dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi, namun menurun tajam pada tahun 2020 akibat dari Covid 19 hingga -1,88. Namun pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi ini tidak hanya terjadi di Kota Bandar Lampung, namun terjadi pada tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung hingga -1,67 dan Pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami kontraksi hingga -2,07.

Selanjutnya, seiring dengan berkurangnya kasus covid 19, meningkatnya imun masyarakat dan mulai melakukan aktivitas, maka geliat perekonomian di Kota Bandar Lampung terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung hingga 3,07% dan secara signifikan ekonomi nasional terus membaik seiring dengan komitmen Pemerintah yang melakukan berbagai kebijakan untuk melakukan recovery ekonomi hingga pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tumbuh 2,79% dan ekonomi nasional mengalami pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 3,69% pada Tahun 2022.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca covid 19 adalah :

- a. Mendorong peran UMKM sebagai sentra ekonomi dengan memberikan stimulasi melalui kemudahan akses pemasaran;
- b. Memberikan kredit 0% (tanpa bunga) pada Bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dimana bunga atas pinjaman ditanggung oleh APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Mengadakan event-event baik skala lokal maupun nasional di Kota Bandar Lampung, sehingga menjadi media bagi UMKM untuk meningkatkan pemasaran;
- d. Mendorong kunjungan wisata baik skala lokal, nasional maupun Internasional, namun tetap mempertahankan protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan imun masyarakat Kota Bandar Lampung baik dengan memberikan bantuan Sembako (beras dll) kepada masyarakat juga memberikan insentif kepada masyarakat dengan memberikan minyak goreng gratis bagi masyarakat yang mau melakukan Vaksin 1 dan 2 atau booster.

Selanjutnya Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 Kabupaten Kota se Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.39
LAJU PERTUMBUHAN PDRB BERDASARKAN HARGA KONSTAN TAHUN 2010
KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	5,09	5,18	-1,16	2,58	4,10
Tanggamus	5,01	5,02	-1,77	2,34	4,16
Lampung Selatan	5,23	5,13	-1,73	2,68	4,91
Lampung Timur	3,71	3,79	-2,26	0,24	2,02
Lampung Tengah	5,33	5,35	-1,02	2,88	4,65
Lampung Utara	5,31	5,33	-1,45	2,82	3,16
Way Kanan	5,18	5,17	-1,16	2,90	4,41
Tulang Bawang	5,42	5,41	-1,34	2,88	3,92
Pesawaran	5,05	5,00	-1,26	2,08	4,55
Pringsewu	5,01	5,03	-1,21	2,91	4,37
Mesuji	5,30	5,26	-1,35	2,84	3,49
Tulang Bawang Barat	5,27	5,36	-1,32	2,89	4,49
Pesisir Barat	5,33	5,47	-1,18	2,07	2,88
Bandar Lampung	6,20	6,17	-1,88	3,10	4,95
Metro	5,68	5,57	-1,79	2,91	4,51

Catatan/Note: * Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber/Source: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya/Based on Census, Surveys, and Other Sources

Sumber BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua Kabupaten Kota di Provinsi Lampung mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi minus selama tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi minus yang tertinggi ada di Kabupaten Lampung Timur, disusul oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Namun seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021, dimana Kota Bandar Lampung merupakan Kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yaitu 3,10%, disusul Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro masing-masing sebesar 2,91%, sedangkan pertumbuhan ekonomi paling

tinggi di tahun 2022 adalah Kota Bandar Lampung sebesar 4,95%, disusul Kabupaten Lampung Selatan (4,91%) dan Kabupaten Lampung Tengah (4,65%).

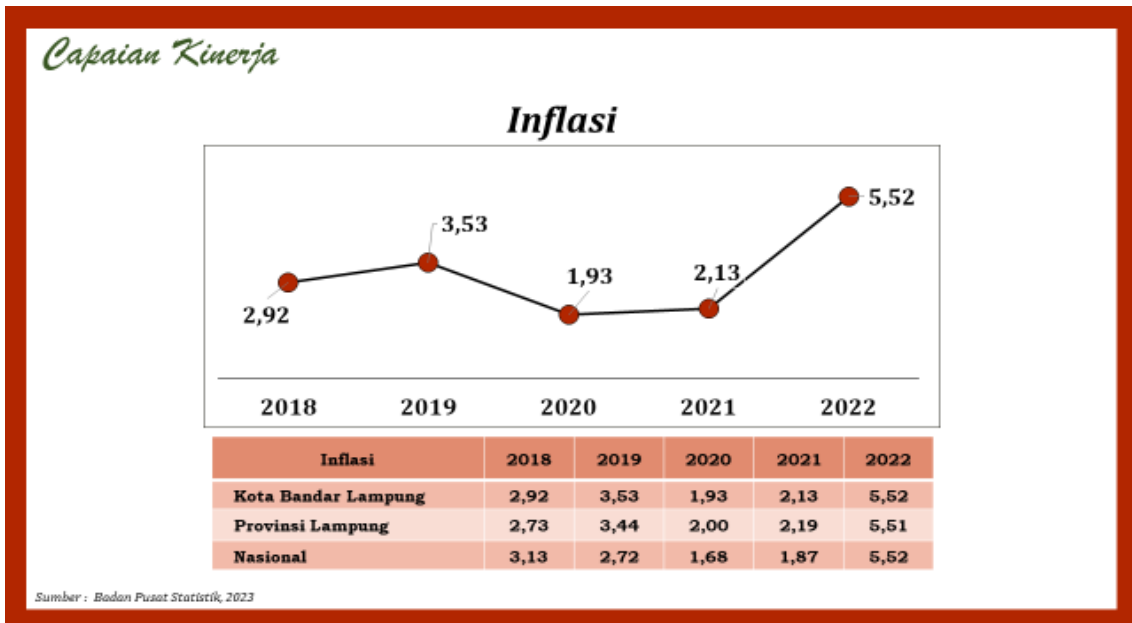
3.4.4. Inflasi

Dalam kamus *Wikipedia*, bahwa *Inflasi* dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, penyebab inflasi akibat kenaikan biaya produksi adalah karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Inflasi ini dapat terjadi kepada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. Selain itu inflasi juga bisa diakibatkan kelangkaan suatu barang (*scarcity*) sehingga terjadilah hukum ekonomi demand dan supply.

Pada Tahun 2022 yang lalu terjadi kelangkaan minyak goreng, akibatnya harga minyak goreng meningkat tajam akibat terbatasnya supply. Kegelisahan masyarakat di Indonesia ini mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan produksi minyak goreng dalam negeri dengan harga yang terjangkau bahkan di subsidi oleh Pemerintah sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melakukan Operasi Pasar khususnya minyak goreng, telur dan beras serta komoditi lain sehingga dapat menolong ekonomi masyarakat. Langkah tegas dan cepat Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan respon yang sangat baik dari Pemerintah, Investor dan para pelaku usaha sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat tertangani tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga keamanan, ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Adapun tingkat inflasi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada Grafik berikut.

GRAFIK 3.4
TINGKAT INFLASI KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG
DAN NASIONAL TAHUN 2018 - 2022



Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi masih lebih rendah dari tingkat inflasi di provinsi Lampung, meskipun secara aggregate masih di atas rata-rata nasional, tetapi angka tersebut masih dalam inflasi aman dan terkendali. Namun pada tahun 2022 angka inflasi Kota Bandar Lampung mencapai 5,52% atau lebih sedikit dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Lampung yang mencapai 5,521% tetapi sama dengan tingkat inflasi nasional yaitu 5,52%.

3.4.5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan penduduknya,

sedangkan pendapatan per kapita daerah dihitung dengan membagi pendapatan daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

Tingkat pendapatan perkapita menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran suatu negara dan daerah, sehingga jika pendapatan perkapita suatu negara atau daerah tinggi berarti daya beli masyarakat tinggi sehingga tingkat kemakmuran kesejahteraan juga tinggi.

TABEL 3.40

PDRB PERKAPITAADHB KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

Wilayah	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	23 404 088	23 614 681	24 714 990
Tanggamus	26 034 307	24 224 635	25 297 765
Lampung Selatan	44 129 169	41 704 922	43 307 952
Lampung Timur	39 797 485	36 710 498	38 323 275
Lampung Tengah	55 368 656	48 861 769	50 315 555
Lampung Utara	38 512 596	37 549 879	39 212 125
Way Kanan	31 022 091	29 594 040	30 746 033
Tulang Bawang	51 065 626	53 691 359	56 118 778
Pesawaran	36 433 510	34 047 403	34 965 125
Pringsewu	27 851 928	27 563 217	28 666 813
Mesuji	51 934 466	45 812 389	47 414 096
Tulang Bawang Barat	41 859 787	39 971 513	41 571 981
Pesisir Barat	30 246 494	28 889 489	30 062 936
Bandar Lampung	56 217 749	50 753 356	51 903 009
Metro	37 683 219	37 361 032	38 737 510
Provinsi Lampung	42 172 315	39 346 531	40 950 417

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB perkapita kota Bandar lampung atas dasar harga berlaku lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Lampung, namun masih kalah dengan pendapatan per kapita Kabupaten Tulang Bawang selaku penghasil perkebunan sawit dan penghasil gula di Provinsi Lampung bahkan tingkat nasional. Pada Tahun 2021, pendapatan Per kapita Kota Bandar Lampung sebesar Rp.51.902.009,- atau lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan perkapita Kota Metro yang hanya Rp. 38.737.510,- atau dibandingkan

dengan pendapatan per kapita Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 40.950.417,-

3.4.6. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Adapun jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dan perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.41
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN /KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	42,71	40,62	39,05	38,12	39,36	36,20
Tanggamus	77,53	73,77	71,90	70,37	71,89	67,43
Lampung Selatan	150,11	148,54	144,44	143,33	145,85	136,21
Lampung Timur	167,64	162,94	158,90	153,57	159,79	149,12
Lampung Tengah	162,38	160,12	153,84	152,28	155,77	143,34
Lampung Utara	131,78	128,02	122,65	119,35	121,91	114,67
Way Kanan	62,00	60,16	58,72	58,41	59,89	54,28
Tulang Bawang	44,31	43,10	42,06	42,43	44,53	39,19
Pesawaran	71,64	70,14	67,36	66,04	68,31	63,17
Pringsewu	44,41	41,64	40,55	40,12	41,04	38,18
Mesuji	15,16	15,01	14,94	14,72	15,24	13,88
Tulang Bawang Barat	21,77	21,93	21,14	20,29	23,03	20,72
Pesisir Barat	23,76	22,98	22,38	22,24	23,23	21,85
Bandar Lampung	100,50	93,04	91,24	93,74	98,76	90,51
Metro	16,06	15,06	14,49	14,31	15,32	13,68
Lampung	1 131,73	1 097,05	1 063,66	1 049,32	1 083,93	1 002,41

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 sebesar 93.740 jiwa dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 98.760 jiwa dan menurun menjadi 90510 pada tahun 2022. Peningkatan penduduk miskin pada tahun 2020 umumnya terjadi pada seluruh Kabupaten/ Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia. Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai contoh Kota Metro, penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 14.310 jiwa menjadi 15.320 jiwa, sedangkan untuk tingkat Provinsi Lampung dari tahun 2020 sebesar 1.049.320 jiwa menjadi 1.083.930 jiwa dan turun menjadi 1.002.410 jiwa pada tahun 2022o. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung menurun menjadi 90.510 jiwa atau penduduk miskin turun sebanyak 8.250 jiwa, hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian di Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Lampung penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 1.083.930 jiwa turun menjadi 1.002.410 jiwa atau mengalami penurunan 81.520 jiwa.

3.5. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2022

Adapun penghargaan yang diterima pada Tahun 2022 baik skala lokal maupun Nasional adalah :

1. Piagam penghargaan Kategori “DUKCAPIL HEBAT” oleh Kementrian Dalam Negeri RI.
2. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kategori A oleh Kemenpan RB;
3. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kategori A oleh Kemenpan RB;
4. Anugerah Parahita Eka Praya tingkat Madya Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak;
5. Kota Layak Anak tingkat Nindya oleh Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak;

6. Penghargaan Indonesia Award kategori Driving Investment Growth Excellent Integrated SMES”S Development Initiatives dari MNC Television Network;
7. Penghargaan TEMPO Media Group sebagai Kepala Daerah Perempuan Inspiratif dan Kategori Inovasi revitalisasi sungai;
8. Penghargaan dari kementrian Kesehatan RI atas Eradikasi frambusia pada Peringatan Hari malaria se Dunia;
9. Penghargaan dari kemendagri atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Bandar Lampung;
10. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara atas Dedikasi dan Berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara.
11. Penghargaan bidang kesehatan dalam Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dari Provinsi Lampung atas Penilaian Investigasi Kontak Terbaik Tahun 2022;
12. Penghargaan sebagai Kota dengan Capaian Pelaksanaan Posyandu Aktif \geq 80% di Kota Bandar Lampung, yang diberikan pada Hari Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HIKN) ke-58 Provinsi Lampung Tahun 2022;
13. Penghargaan sebagai Kota terpilih dalam penerapan dan penggerakan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di setiap tatanan, yang diberikan pada Hari Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 Provinsi Lampung Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Didalamnya terdapat potret pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Secara umum dapat disampaikan bahwa pembangunan pada tahun kedua RPJMD ini digambarkan melalui pencapaian 31 indikator kinerja sasaran strategis pembangunan. Ketercapaian kinerja sesuai target dan melampaui target terjadi pada 18 indikator kinerja (58,06%). Sementara pada 13 indikator kinerja (41,94%) belum mencapai target.

Apabila dilihat dari penyelenggaraan pembangunan, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tertinggi terjadi pada **Misi IV yaitu Mengembangkan Dan Memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat** dengan capaian sasaran tertinggi pada Sasaran **Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja** sebesar **290,96%**, Sedangkan capaian kinerja terendah terjadi pada **Misi I yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat** dengan capaian sasaran terendah pada Sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk** sebesar **90,86%**.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa perkembangan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pencapaian 7 (tujuh) misi RPJMD di tahun kedua, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Kondisi ini memberikan optimisme pencapaian Visi Kota Bandar Lampung di tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dapat tercapai.

Dukungan komitmen pimpinan yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang memadai, dan penerapan SPBE menjadi faktor pendorong yang kuat dalam menciptakan kondisi ini.

4.2. SARAN

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Bandar Lampung menempuh berbagai langkah diantaranya:

1. Membangun komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan seluruh staff instansi yang bersangkutan;
2. Mulai merancang sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Objektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
7. Adanya pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh stakeholder terkait.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, **31** Maret 2023

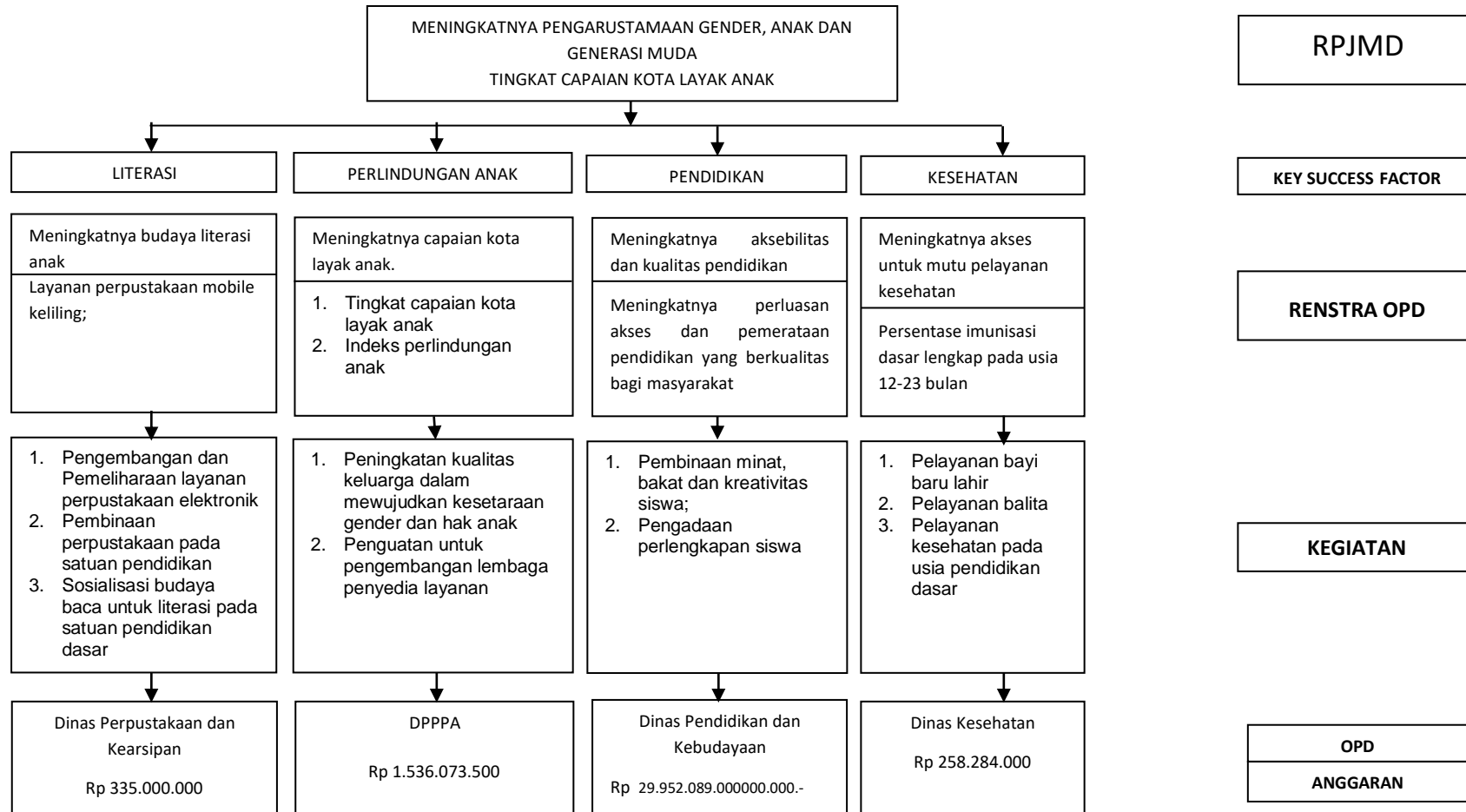
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



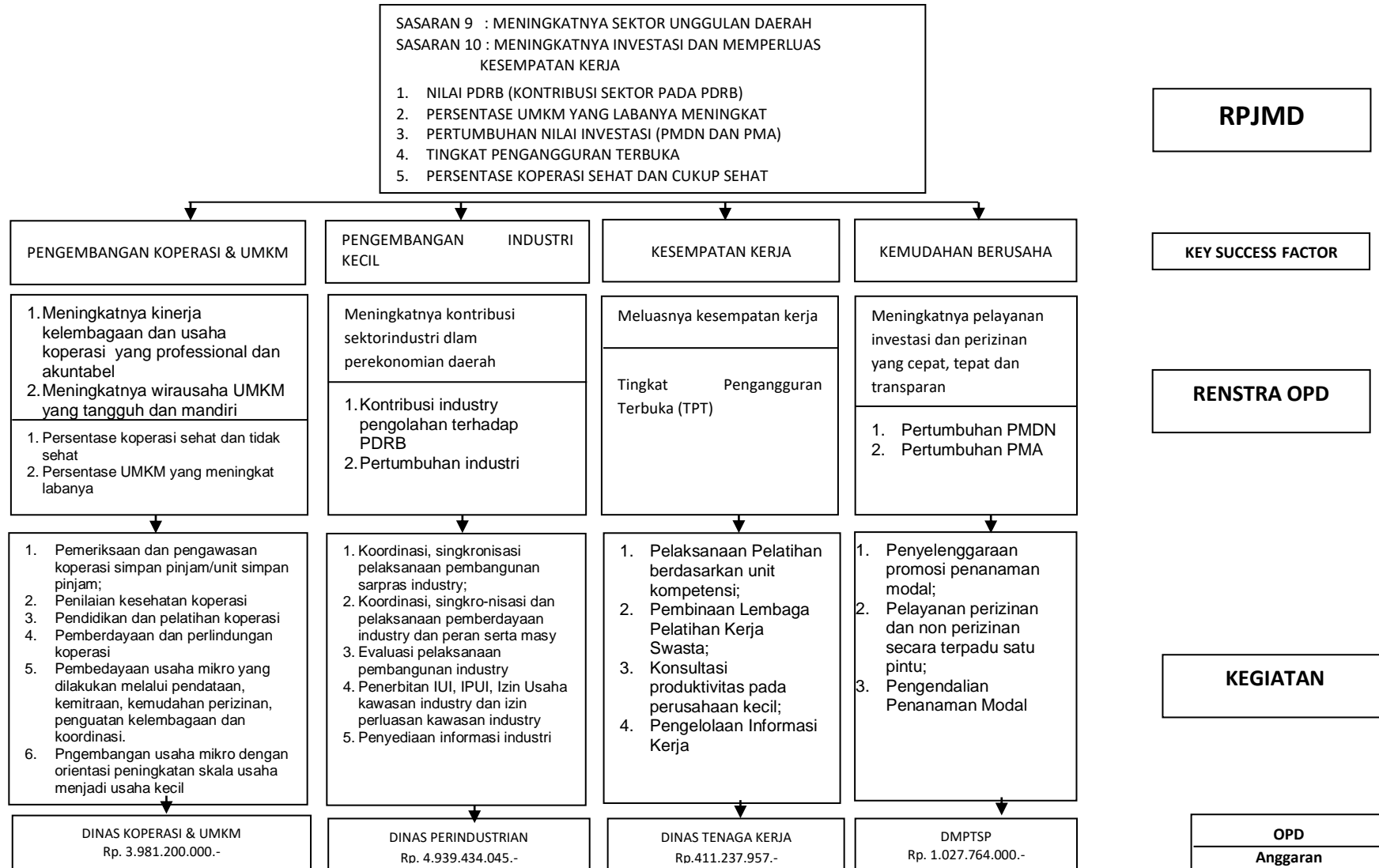
EVA DWIANA

LAMPIRAN I

CAS CADING RPJMD (MISI II, SASARAN 2)



CAS CADING RPJMD (MISI IV, SASARAN 9 DAN 10)



LAMPIRAN II

CROSS CUTTING PROGRAM

IKU : KOTA LAYAK ANAK

